



**Pemerintah Kota Malang  
Jalan Tugu No.1 Malang**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KOTA  
MALANG TAHUN 2022**



**Pemerintah Kota Malang  
Jalan Tugu No.1 Malang**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH  
TAHUN AGGARAN 2022**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih dalam perlindungan dan pertolongan-Nya sehingga masih memiliki kesempatan dan kenikmatan sehat untuk mampu menyusun serta menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada dimensi kebijakan dan kegiatan tahun anggaran 2022 kondisi sosio politik dan suasana kebatinan melingkupi nasional hingga ke daerah adalah situasi Pandemi COVID-19. Hal ini merubah semua *landscape* kebijakan anggaran dari pusat hingga daerah. Pandemi menuntut penanganan secara komprehensif dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah realokasi dan *refocusing* anggaran yang berimplikasi belum sepenuhnya target kinerja dapat tercapai.

Namun, rasa syukur tetap kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada situasi pandemi justru *spirit* satu jiwa Arema, kegotongroyongan dan keguyuban makin menguat. Untuk itu semua, saya sampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam mengisi pembangunan di berbagai sektor, dengan kinerja dan produktivitas serta komitmen tinggi bersama Pemerintah Kota Malang untuk tetap melaksanakan berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2022 ini memberikan manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami sangat berharap bahwa kebersamaan dan kekompakan tetap terjalin utuh dan tetap berlanjut untuk mewujudkan **“KOTA MALANG YANG BERMARTABAT”**.

Malang, Maret 2023



**WALIKOTA MALANG,**

**Drs. H. SUTIAJI**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
1.1.1 Penjelasan Umum .....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	10
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	83
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	<b>86</b>
<b>2.1 Capaian Kinerja Makro</b> .....	<b>86</b>
<b>2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</b> .....	<b>87</b>
<b>2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</b> .....	<b>178</b>
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b> .....	<b>204</b>
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b> .....	<b>205</b>
<b>4.1 Bidang Urusan Pendidikan</b> .....	205
<b>4.2 Bidang Urusan Kesehatan</b> .....	212
<b>4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum</b> .....	230
<b>4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat</b> .....	237
<b>4.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b> .....	244
<b>4.6 Bidang Urusan Sosial</b> .....	250
<b>4.7 Bidang Urusan Bencana</b> .....	256
<b>4.8 Program dan Kegiatan</b> .....	262
4.8.1 Program Kegiatan SPM Bidang Pendidikan .....	264
4.8.2 Program Kegiatan SPM Bidang Kesehatan .....	265
4.8.3 Program Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum .....	267
4.8.4 Program Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat .....	269
4.8.5 Program Kegiatan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	270
4.8.6 Program Kegiatan SPM Bidang Sosial .....	271
4.8.7 Program Kegiatan SPM Bidang Bencana .....	273
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>274</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **1.1.1. Penjelasan Umum**

##### **a) Undang-Undang Pembentukan Daerah**

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3354);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 174)

**b) Data Geografis Wilayah**

Kota Malang yang merupakan pusat pengembangan kawasan tengah Provinsi Jawa Timur, secara astronomi berada pada  $112^{\circ}34'38.83''\text{BT}$ - $112^{\circ}40'59.41''\text{BT}$  dan  $07^{\circ}54'38.97''\text{LS}$ - $08^{\circ}02'47.04''\text{LS}$  (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012).

Kota Malang yang merupakan pusat pengembangan kawasan tengah Provinsi Jawa Timur, secara astronomi berada pada  $112^{\circ}34'8''\text{BT}$ - $112^{\circ}41'37''\text{BT}$  dan  $07^{\circ}54'39''\text{LS}$ - $08^{\circ}3'5''\text{LS}$  (Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042).

Kota Malang yang terletak di sebelah selatan Kota Surabaya berjarak 89 km, secara geografis berada di daerah pegunungan pada ketinggian 395 sampai dengan 618 mdpl (Peta Rupabumi Bakosurtanal 2002), disebelah utara terdapat Gunung Arjuno, di sebelah timur terdapat Gunung Semeru, dan di sebelah barat terdapat Gunung Kawi dan Gunung Panderman. Selain itu Kota Malang juga dialiri oleh Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Bango, Sungai Amprong dan Sungai Sukun.

Selama tahun 2022 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu mencapai 496,1 mm selama 24 hari. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli selama 3 hari (Kota Malang Dalam Angka, 2023). Hal ini menyebabkan rerata kelembaban udara kota mencapai 73,1%-84,2%, dengan kelembaban minimum mencapai 34% dan kelembaban maksimum mencapai 99%. Rerata

suhu udara kota adalah 24,4°C-26°C (suhu udara minimum mencapai 14,6°C dan suhu udara maksimum mencapai 31,4°C). Luas wilayah Kota Malang mencapai 114,261 km<sup>2</sup> atau 11.426,16 Ha (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987), 111,08 km<sup>2</sup> atau 11.108 Ha (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042) yang secara administratif berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tajinan, Kecamatan Wagir dan Kecamatan Pakisaji;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

**c) Jumlah Penduduk**

Mencermati publikasi BPS Kota Malang tahun 2023, jumlah penduduk Kota Malang Bulan Juni Tahun 2022 mencapai 846.126 jiwa terdiri atas 420.897 jiwa penduduk laki-laki dan 425.229 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk pada tahun 2022 lebih banyak daripada jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 844.933 jiwa atau bertambah 1.193 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kedungkandang mencapai 208.741 jiwa, disusul oleh Kecamatan Sukun sebesar 196.689 jiwa, Kecamatan Blimbing sebanyak 182.693 jiwa, Kecamatan Lowokwaru sebanyak 163.964 jiwa, dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Klojen sebanyak 94.072 jiwa. Secara rinci keadaan penduduk di masing-masing kecamatan tersaji dalam tabel berikut:



**Tabel 1.1.1**  
**Jumlah, Laju dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>	<b>LAJU PERTUMBUHAN TAHUN 2021-2022</b>	<b>KEPADATAN PENDUDUK PER KM<sup>2</sup></b>
<b>1</b>	Blimbing	182.693	0,10	10.304
<b>2</b>	Klojen	94.072	-0.04	10.651
<b>3</b>	Kedungkandang	208.741	0.31	5.238
<b>4</b>	Sukun	196.689	0.10	9.427
<b>5</b>	Lowokwaru	163.795	0.10	6.889
		844.933	0.13	7.617

Sumber: BPS Kota Malang, 2022

Penduduk Kota Malang tahun 2022 menurut kelompok umur terbanyak berada pada umur 30-34 mencapai 66.966 jiwa, dan tersedikit berada pada umur 70-74 mencapai 19.516 jiwa. Secara agregat kelompok umur balita yakni umur 0 tahun sampai dengan 4 tahun mencapai 59.556 jiwa, sedangkan umur sekolah yakni 5 tahun sampai dengan 24 tahun mencapai 254.224 jiwa. Umur produktif yakni 25 tahun sampai dengan 59 tahun mencapai 424.735 jiwa, adapun jumlah penduduk umur lansia yakni 60 tahun lebih mencapai 106.015 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

<b>KELOMPOK UMUR</b>	<b>LAKI LAKI 2022</b>	<b>PEREMPUAN 2022</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>0 - 4</b>	30593	28963	59556
<b>05 - 09</b>	31926	30584	62510
<b>10 - 14</b>	32008	30405	62413
<b>15 - 19</b>	31480	30021	61501
<b>20 - 24</b>	33113	31924	65037
<b>25 - 29</b>	33673	32581	66254
<b>30 - 34</b>	34161	32805	66966
<b>35 - 39</b>	33828	32671	66499
<b>40 - 44</b>	32200	31565	63765
<b>45 - 49</b>	29026	29532	58558
<b>50 - 54</b>	26225	28171	54396
<b>55 - 59</b>	22926	25579	48505
<b>60 - 64</b>	19012	21082	40094
<b>65 - 69</b>	14192	16636	30828
<b>70 - 75</b>	8813	10703	19516
<b>75 +</b>	7721	12007	19728
<b>JUMLAH</b>	<b>420897</b>	<b>425229</b>	<b>846126</b>

Sumber: BPS Kota Malang, 2022

**d) Jumlah Kecamatan dan Kelurahan**

Kota Malang yang memiliki luas wilayah mencapai 11.426,16 Ha atau 114.261,6 km<sup>2</sup> (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987), terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) Kelurahan.

**Tabel 1.1.3**  
**Jumlah Kecamatan dan Kelurahan**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>
<b>1</b>	Blimbing	11
<b>2</b>	Klojen	11
<b>3</b>	Kedungkandang	12
<b>4</b>	Sukun	11
<b>5</b>	Lowokwaru	12

Sumber : BKPSDM Kota Malang, 2022

**Tabel 1.1.4**  
**Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI</b>
<b>1</b>	Sekretariat Daerah	151
	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1
	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	1
	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kesejahteraan dan SDM	1
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1
	Asisten Administrasi Umum	1
	Bagian Hubungan Masyarakat	18
	Bagian Hukum	14
	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	26
	Bagian Organisasi	10
	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	8
	Bagian Pemerintahan	8
	Bagian Perekonomian, Infastruktur dan Sumber Daya Alam	9
	Bagian Umum	51
<b>2</b>	Inspektorat Daerah	46
<b>3</b>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24
<b>4</b>	Badan Keuangan dan Aset Daerah	46
<b>5</b>	Badan Pendapatan Daerah	59
<b>6</b>	Badan Perencanaan	42

	Pembangunan Daerah	
<b>7</b>	Badan penanggulangan Bencana Daerah	21
<b>8</b>	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	61
<b>9</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	61
<b>10</b>	Dinas Kesehatan	853
<b>11</b>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	59
<b>12</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika	53
<b>13</b>	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	221
<b>14</b>	Dinas Lingkungan Hidup	740
<b>15</b>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	116
<b>16</b>	Dinas Perhubungan	97
<b>17</b>	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	48
<b>18</b>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55
<b>19</b>	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Layanan Terpadu satu Pintu	66
<b>20</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	132
<b>21</b>	Sekretariat DPRD	29
<b>22</b>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2332

<b>23</b>	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	46
<b>24</b>	Kecamatan Blimbing	117
<b>25</b>	Kecamatan Klojen	112
<b>26</b>	Kecamatan kedungkandang	136
<b>27</b>	Kecamatan Sukun	132
<b>28</b>	Kecamatan Lowokwaru	129

Sumber : BKPSDM Kota Malang, 2022

**e) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

**1) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sesuai dengan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 pendahuluan (*preliminary*) sebelum audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2.171.753.404.373,60 terdiri atas: pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp718.337.240.633,10 pendapatan transfer sebesar Rp1.450.405.048.247,00 dan lain - lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3.011.112.493,50. Realisasi pendapatan menurut jenisnya dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 1.1.5**  
**Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.171.753.404.373,60</b>
<b>1.1</b>	Pendapatan Asli Daerah	718.337.240.633,10
<b>1.2</b>	Pendapatan Transfer	1.450.405.048.247,00
<b>1.3</b>	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.011.115.493,50

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022, *unaudited*

**2) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Realisasi belanja daerah mencapai Rp2.188.318.745.870,33 terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1.871.123.190.030,33; belanja modal sebesar Rp310.813.569.513,00; dan belanja tak terduga Rp6.381.986.327,00. Realisasi belanja menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1.6**  
**Realisasi Belanja Menurut Jenisnya**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.188.318.745.870,33</b>
<b>2.1</b>	BELANJA OPERASI	1.871.123.190.030,33
<b>2.2</b>	BELANJA MODAL	310.813.569.513,00
<b>2.3</b>	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.381.986.327,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022, *unaudited*

**3) Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan**

Realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp477.018.940.984,57 terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp484.293.940.984,57 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.275.000.000,00. Realisasi pembiayaan menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1.7**  
**Realisasi Pembiayaan Menurut Jenisnya**

NO	URAIAN	REALISASI (Rp.)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>477.018.940.984,57</b>
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>484.293.940.984,57</b>
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.275.000.000,00</b>

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022, *unaudited*

### 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

#### a) Permasalahan strategis pemerintah daerah;

Permasalahan strategis pemerintah kota Malang sebagaimana tertuang dalam RKPD 2022:

1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekosistem ekonomi kreatif dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0;
2. Pemulihan ekonomi berbasis penguatan daya saing kerakyatan melalui revitalisasi pasar terutama dalam menghadapi dampak Covid-19;
3. Optimalisasi eksplorasi karakter dan identitas kota sebagai pengembangan destinasi pariwisata perkotaan.;
4. Optimalisasi upaya peningkatan SDM terdidik, berkarakter dan berbudaya dalam menghadapi era digital;
5. Pemerataan kualitas pelayanan pendidikan di seluruh wilayah perlu ditingkatkan;
6. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama jaminan pelayanan kesehatan;
7. Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan;
8. Peningkatan kualitas komitmen pengarusutamaan gender;
9. Peningkatan ketersediaan bahan pangan;
10. Penanganan masalah pengangguran dan

- kemiskinan sebagai dampak dari pandemi Covid-19;
11. Kebijakan penanganan wabah penyakit hewan yang cepat, tepat, tanggap dan sesuai standar yang ditetapkan;
  12. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
  13. Penguatan wawasan kebangsaan dari semua latar belakang kelompok masyarakat untuk mencegah timbulnya bencana sosial;
  14. Peningkatan kualitas infrastruktur yang terintegrasi terutama dalam penanganan kemacetan;
  15. Optimalisasi sistem drainase dan utilitas secara terpadu dan berkelanjutan;
  16. Penataan bangunan dan lingkungan;
  17. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang unggul dan berdaya saing;
  18. Optimalisasi keselarasan antara penyelenggaraan pembangunan dengan kualitas lingkungan hidup perlu, dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
  19. Peran serta masyarakat dalam mitigasi Perubahan Iklim;
  20. Peningkatan kualitas penanganan dan dampak bencana alam dan bencana non alam;
  21. Profesionalisme aparatur pemerintahan dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang semakin bersih, profesional dan inovatif;
  22. Penyederhanaan birokrasi pelayanan publik melalui digitalisasi layanan dan integrasi sistem;
  23. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja serta Satlinmas;
  24. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal.



**b) Visi dan Misi Kepala Daerah;**

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025. Mengacu tema pembangunan daerah pada RPJPD ke-4 disandingkan dengan keadaan termutakhir tahun 2018, Walikota dan Wakil Walikota terpilih menetapkan Kota Malang Bermartabat sebagai visi pembangunan kota Malang tahun 2018-2023.

Kota Malang Bermartabat haruslah menjadi capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2023, dimana capaian itu dapat menunjukkan karakter mulia seluruh warga Kota Malang sebagai negeri makmur yang diridhoi Allah SWT (*baladatan thoyyibatun wa robbun ghofur*) yang dicirikan dengan masyarakat paripurna, terdidik dan berkarakter, lembut dan tegas, aman dan nyaman, dan penuh kesadaran positif.

Kota Malang pada tahun 2023 haruslah menjadi kota yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, dengan nilai religius tinggi yang dilandasi sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melayani dengan sepenuh hati. Dengan berbagai keunggulan itu, Kota Malang akan memiliki daya saing sebagai kota terkemuka yang berprestasi diberbagai bidang.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Malang Bermartabat, berikut rumusan empat misi pembangunan daerah tahun 2018 - 2023:

**Misi 1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga.**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan

kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.

**Misi 2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan.**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

**Misi 3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender.**

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, serta kerukunan sosial.

**Misi 4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel.**

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

**c) Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah;**

Program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tahun 2022, berikut disajikan berdasarkan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

1. Urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar.
  - a. Pendidikan
    - 1) Program pengelolaan pendidikan
    - 2) Program pendidik dan tenaga kependidikan
  - b. Kesehatan
    - 1) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
    - 2) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
    - 3) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
    - 4) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
  - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - 1) Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
    - 2) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
    - 3) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
    - 4) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
    - 5) Program pengembangan permukiman
    - 6) Program penataan bangunan gedung
    - 7) Program penataan bangunan dan lingkungannya
    - 8) Program penyelenggaraan jalan
    - 9) Program pengembangan jasa konstruksi
    - 10) Program penyelenggaraan penataan ruang
    - 11) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 12) Program pengembangan perumahan
  - 13) Program kawasan permukiman
  - 14) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
- d. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 1) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
  - 2) Program penanggulangan bencana
  - 3) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- e. Sosial
- 1) Program pemberdayaan sosial
  - 2) Program rehabilitasi sosial
  - 3) Program perlindungan dan jaminan sosial
  - 4) Program penanganan bencana
  - 5) Program pengelolaan taman makam pahlawan
2. Urusan Wajib Pemerintahan Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar.
- a. Tenaga Kerja.
- 1) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
  - 2) Program penempatan tenaga kerja
  - 3) Program hubungan industrial
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
  - 2) Program perlindungan perempuan
  - 3) Program peningkatan kualitas keluarga
  - 4) Program pengelolaan sistem data gender dan

anak

5) Program perlindungan khusus anak

c. Pangan

1) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

2) Program pengawasan keamanan pangan.

d. Pertanahan

1) Program pengelolaan tanah kosong

e. Lingkungan Hidup

1) Program perencanaan lingkungan hidup;

2) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

3) Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)

4) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

5) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

6) Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

7) Program penanganan pengaduan lingkungan hidup

8) Program pengelolaan persampahan

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Program pendaftaran penduduk

2) Program pencatatan sipil

3) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

- 4) Program pengelolaan profil kependudukan
- g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 1) Program pengendalian penduduk
  - 2) Program pembinaan keluarga berencana (KB)
  - 3) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
- h. Perhubungan
- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- i. Komunikasi dan Informatika
- 1) Program informasi dan komunikasi publik;
  - 2) Program aplikasi informatika
- j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 1) Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
  - 2) Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
  - 3) Program pendidikan dan latihan perkoperasian
  - 4) Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
  - 5) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
  - 6) Program Pengembangan UMKM
- k. Penanaman Modal
- 1) Program pengembangan iklim penanaman modal
  - 2) Program pelayanan penanaman modal
  - 3) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

- 4) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
1. Kepemudaan dan Olahraga
  - 1) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
  - 2) Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
  - 3) Program pengembangan kapasitas kepramukaan
- m. Statistik
  - 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- n. Persandian
  - 1) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
- o. Kebudayaan
  - 1) Program pengembangan kebudayaan
  - 2) Program pengembangan kesenian tradisional
  - 3) Program pembinaan sejarah
  - 4) Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
  - 5) Program pengelolaan permuseuman
- p. Perpustakaan
  - 1) Program pembinaan perpustakaan
- q. Kearsipan
  - 1) Program pengelolaan arsip
3. Urusan Pilihan
  - a. Kelautan dan Perikanan
    - 1) Program pengelolaan perikanan budidaya
    - 2) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
  - b. Pariwisata
    - 1) Program peningkatan daya tarik destinasi

- pariwisata
- 2) Program pemasaran pariwisata
- 3) Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- c. Pertanian
  - 1) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
  - 2) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
  - 3) Program penyuluhan pertanian.
- d. Perdagangan
  - 1) Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
  - 2) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
  - 3) Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
  - 4) Program standarisasi dan perlindungan konsumen
  - 5) Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
- e. Perindustrian
  - 1) Program perencanaan dan pembangunan industri
  - 2) Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota
  - 3) Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
- 4. Urusan Penunjang Pemerintah
  - a. Perencanaan
    - 1) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
    - 2) Program koordinasi dan sinkronisasi



perencanaan pembangunan daerah

- b. Keuangan
    - 1) Program pengelolaan keuangan daerah
    - 2) Program pengelolaan barang milik daerah
    - 3) Program pengelolaan pendapatan daerah
  - c. Kepegawaian
    - 1) Program kepegawaian daerah
  - d. Pendidikan dan Pelatihan
    - 1) Program pengembangan sumber daya manusia
  - e. Penelitian dan Pengembangan
    - 1) Program penelitian dan pengembangan daerah
5. Urusan Pemerintahan Umum Lainnya
- a. Inspektorat Daerah
    - 1) Program penyelenggaraan pengawasan
    - 2) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
  - b. Kesatuan Bangsa dan Politik
    - 1) Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
    - 2) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
    - 3) Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
    - 4) Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
    - 5) Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

- c. Sekretariat DPRD
    - 1) Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
  - d. Kecamatan
    - 1) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
    - 2) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
    - 3) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
    - 4) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
  - e. Sekretariat Daerah
    - 1) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
    - 2) Program perekonomian dan pembangunan
  - f. Non Urusan
    - 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- d) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan perencanaan tahunan;**
- 1. Program pengelolaan Pendidikan**
    - 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**
      - 1) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
      - 2) Pengadaan Perlengkapan Siswa
      - 3) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
      - 4) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
      - 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,

Prasarana dan Utilitas Sekolah

- 6) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 7) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 8) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

## **2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

- 1) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 2) Pengadaan Perlengkapan Siswa
- 3) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 4) Pengadaan Mebel Sekolah
- 5) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
- 7) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- 8) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 9) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

## **3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

- 1) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 4) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- 5) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

- 6) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 8) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- 9) Pengelolaan Dana BOP PAUD

**4. Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan**

- 1) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- 2) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 3) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
- 4) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- 8) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 9) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 10) Pemeliharaan Mebel Sekolah
- 11) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

**2. Program pendidik dan tenaga kependidikan**

**1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

- 1) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 2) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

**3. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**

**1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3) Pengadaan Obat, Vaksin
- 4) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 5) Pengadaan Bahan Habis Pakai
- 6) Pembangunan Puskesmas
- 7) Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya

**2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri

dan Tradisional Lainnya

- 3) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 11) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 13) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- 15) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 16) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 18) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- 20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- 21) Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
- 22) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 23) Operasional Pelayanan Puskesmas
- 24) Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- 25) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 26) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 27) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 28) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- 29) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- 30) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

**3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
- 2) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

**4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan**

**1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

**5. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman**

**1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

**2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi



Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- 2) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

## **6. Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan**

### **1. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

### **2. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

## **7. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)**

### **1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- 2) Pembangunan Embung dan Penampung Air

Lainnya

- 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
  - 1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- 8. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum**
  - 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
    - 2) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
    - 3) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
- 9. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah**
  - 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
    - 2) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
    - 3) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
    - 4) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
    - 5) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
    - 6) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana

dan Prasarana IPLT

- 7) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
- 8) Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

## **10. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase**

### **1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- 2) Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
- 3) Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
- 4) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

## **11. Program pengembangan permukiman**

### **1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

## **12. Program penataan bangunan Gedung**

### **1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**

- 1) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- 3) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

### **13. Program penataan bangunan dan lingkungannya**

#### **1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Penataan Bangunan dan Lingkungan
- 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota

### **14. Program penyelenggaraan jalan**

#### **1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**

- 1) Pembangunan Jalan
- 2) Pembangunan Jembatan
- 3) Pemeliharaan Berkala Jalan
- 4) Pemeliharaan Berkala Jembatan
- 5) Pemeliharaan Rutin Jalan
- 6) Pemeliharaan Rutin Jembatan
- 7) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan

dan Jembatan

8) Rehabilitasi Jalan

**15. Program pengembangan jasa konstruksi**

**1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**

1) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

**2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

1) Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

2) Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi

**3. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**

1) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi

**16. Program penyelenggaraan penataan ruang**

**1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**

1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

2) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang

**2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

**3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
  - 2) Sistem Informasi Penataan Ruang
  - 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
- 17. Program pengembangan perumahan**
- 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**
    - 1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - 2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**
    - 1) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
  - 3. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**
    - 1) Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
- 18. Program kawasan permukiman**
- 1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**
    - 1) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman

Kumuh

**19. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)**

**1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

**20. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum**

**1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

**2. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

**3. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**

- 1) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 2) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan

**21. Program penanggulangan bencana**

**1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**

- 1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- 2) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

**2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

- 1) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- 3) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- 4) Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

**3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

- 1) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

**4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**

- 1) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota



**22. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran**

**1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

**2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

**23. Program pemberdayaan sosial**

**1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

**24. Program rehabilitasi sosial**

**1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

- 1) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

- 2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 3) Pemberian Layanan Kedaruratan
- 4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- 5) Penyediaan Permakanan

**2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**

- 1) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 2) Pemberian Layanan Kedaruratan

**25. Program perlindungan dan jaminan sosial**

**1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

**26. Program penanganan bencana**

**1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**

- 1) Penyediaan Makanan

**2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**

- 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

**27. Program pengelolaan taman makam pahlawan**

- 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**
  - 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - 2) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- 28. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja**
  - 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**
    - 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- 29. Program penempatan tenaga kerja**
  - 1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- 30. Program hubungan industrial**
  - 1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
    - 2) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 31. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan**

**1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**

1) Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

**2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**

1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

**3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**

1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

**32. Program perlindungan perempuan**

**1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

**2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

**33. Program peningkatan kualitas keluarga**

**1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**34. Program pengelolaan sistem data gender dan anak**

**1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

**35. Program perlindungan khusus anak**

**1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

**2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**36. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**

**1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**

- 1) Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

**2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**

- 1) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

**37. Program pengawasan keamanan pangan**

**1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

**38. Program pengelolaan tanah kosong**

**1. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**

- 1) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

**39. Program perencanaan lingkungan hidup**

**1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**

- 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

**40. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**

**1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

- 2) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

**41. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)**

**1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**

- 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 2) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
- 3) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

**42. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)**

**1. Penyimpanan Sementara Limbah B3**

- 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

**43. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**

**1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH



- 3) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**44. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**

**1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- 2) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

**45. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup**

**1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**

- 1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

**46. Program pengelolaan persampahan**

**1. Pengelolaan Sampah**

- 1) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

- 4) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

#### **47. Program pendaftaran penduduk**

##### **1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

- 1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- 2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

#### **48. Program pencatatan sipil**

##### **1. Pelayanan Pencatatan Sipil**

- 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- 2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

#### **49. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan**

##### **1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**

- 1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

##### **2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

- 2) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

#### **50. Program pengelolaan profil kependudukan**

##### **1. Penyusunan Profil Kependudukan**

- 1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

#### **51. Program pengendalian penduduk**

##### **1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
- 2) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
- 3) Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

## **52. Program pembinaan keluarga berencana (KB)**

### **1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**

- 1) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- 2) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK

### **2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**

- 1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

### **3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- 3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

### **4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah**

**Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**

- 1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- 2) Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

**53. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)**

**1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- 1) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
- 2) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 3) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 4) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

**2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah**

**Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 2) Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,

**54. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

**1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**

- 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

**2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 2) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

**3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**

- 1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

**4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- 2) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

**5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**

- 1) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- 3) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- 4) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

**6. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**

- 1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

**7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar

Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

**9. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

**55. Program informasi dan komunikasi public**

**1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- 2) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- 3) Pelayanan Informasi Publik
- 4) Pengelolaan Konten dan Perencanaan MediaKomunikasi Publik
- 5) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

## **56. Program aplikasi informatika**

### **1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

### **2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1) Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

3) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

4) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

5) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

## **57. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi**

### **1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

## **58. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi**

### **1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang**



**Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)  
Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP  
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

**59. Program pendidikan dan latihan perkoperasian**

**1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi  
Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam  
Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan  
Perkoperasian serta Kapasitas dan  
Kompetensi SDM Koperasi
- 2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan  
Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi  
SDM Usaha Mikro

**60. Program pemberdayaan dan perlindungan  
koperasi**

**1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi  
yang Keanggotaannya dalam Daerah  
Kabupaten/Kota**

- 1) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,  
Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses  
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,  
Penataan Manajemen, Standarisasi, dan  
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan  
Kabupaten/Kota

**61. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha  
kecil, dan usaha mikro (UMKM)**

**1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan  
melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan  
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan  
Koordinasi dengan Para Pemangku  
Kepentingan**

- 1) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha

Mikro

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- 3) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- 4) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
- 5) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

## **62. Program pengembangan UMKM**

### **1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**

- 1) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

## **63. Program pengembangan iklim penanaman modal**

### **1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

## **64. Program pelayanan penanaman modal**

### **1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

**65. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal**

**1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

**66. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**

**1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

**67. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**

**1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas  
Daya Saing Wira Usaha Pemula

- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
- 3) Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
- 4) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
- 5) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
- 6) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

## **2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

## **68. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**

### **1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- 2) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

## **2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
- 3) Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

## **3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**

- 1) Pengembangan Organisasi Keolahragaan

## **4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**

- 1) Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
- 2) Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
- 3) Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

## **69. Program pengembangan kapasitas kepramukaan**

### **1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**

- 1) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

## **70. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

### **1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- 2) Membangun Metadata Statistik Sektoral

- 3) Pengembangan Infrastruktur
- 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- 5) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- 6) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

## **71. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi**

### **1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- 3) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### **2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **72. Program pengembangan kebudayaan**

### **1. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- 2. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
- 73. Program pengembangan kesenian tradisional**
- 1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
- 74. Program pembinaan sejarah**
- 1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
- 75. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya**
- 1. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**
    - 1) Pelindungan Cagar Budaya
- 76. Program pengelolaan permuseuman**
- 1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**
    - 1) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu
    - 2) Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
    - 3) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

## **77. Program pembinaan perpustakaan**

### **1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- 2) Pengembangan Bahan Pustaka
- 3) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

### **2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

## **78. Program pengelolaan arsip**

### **1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

### **2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

### **3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**

- 1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

## **79. Program pengelolaan perikanan budidaya**

### **1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**

- 1) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan



## **2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**

- 1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## **80. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**

### **1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**

- 1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

## **81. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**

### **1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- 2) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- 3) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

### **2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pengelolaan Investasi Pariwisata

## **82. Program pemasaran pariwisata**

### **1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**

- 1) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata

**83. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif**

**1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**

- 1) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
- 2) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
- 3) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

**84. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian**

**1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**

- 1) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- 2) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

**2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

**85. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner**

**1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Hewan dan Zoonosis

**2. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**

- 1) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
- 2) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

**86. Program penyuluhan pertanian**

**1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**

- 1) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

**87. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan**

**1. Penerbitan Tanda Daftar Gudang**

- 1) Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

**2. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**

- 1) Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik

**3. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**

- 1) Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

**88. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan**

**1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

**2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**

- 1) Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

**89. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**

**1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**

- 1) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- 2) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

**90. Program standardisasi dan perlindungan konsumen**

**1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**

- 1) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
- 2) Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

**91. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri**

**1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

- 1) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

**92. Program perencanaan dan pembangunan industri**

**1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**

- 1) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- 4) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

**93. Program pengendalian izin usaha industri**

**1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

**94. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional**

**1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**

- 1) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

**95. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**

**1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

- 1) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

**2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

**3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

**96. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**

**1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

- 1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

## Pembangunan Manusia

- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen  
Perencanaan Pembangunan Perangkat  
Daerah Bidang Pemerintahan
- 3) Asistensi Penyusunan Dokumen  
Perencanaan Pembangunan Perangkat  
Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi  
Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang  
Pemerintahan
- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen  
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang  
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

## **2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan  
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan  
Daerah Bidang SDA
- 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi  
Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang  
SDA
- 3) Asistensi Penyusunan Dokumen  
Perencanaan Pembangunan Perangkat  
Daerah Bidang Perekonomian
- 4) Asistensi Penyusunan Dokumen  
Perencanaan Pembangunan Perangkat  
Daerah Bidang SDA
- 5) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan  
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan  
Daerah Bidang Perekonomian
- 6) Koordinasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang  
Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi  
Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang  
Perekonomian

### **3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan  
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan  
Daerah Bidang Kewilayahan
- 2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan  
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan  
Daerah Bidang Infrastruktur
- 3) Asistensi Penyusunan Dokumen  
Perencanaan Pembangunan Perangkat  
Daerah Bidang Infrastruktur
- 4) Koordinasi Penyusunan Dokumen  
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang  
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 5) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi  
Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang  
Infrastruktur
- 6) Asistensi Penyusunan Dokumen  
Perencanaan Pembangunan Perangkat  
Daerah Bidang Kewilayahan
- 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi  
Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang  
Kewilayahan



## **97. Program pengelolaan keuangan daerah**

### **1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 7) Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

### **2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- 1) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 3) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

### **3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- 1) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

**5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**

- 1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

**98. Program pengelolaan barang milik daerah**

**1. Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- 1) Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 2) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 3) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 5) Pengamanan Barang Milik Daerah
- 6) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan

Barang Milik Daerah

- 7) Penilaian Barang Milik Daerah
- 8) Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 9) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

## **99. Program pengelolaan pendapatan daerah**

### **1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**

- 1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Penagihan Pajak Daerah
- 4) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 5) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 6) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- 7) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 8) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

## **100. Program kepegawaian daerah**

### **1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

- 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- 2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- 3) Pengelolaan Data Kepegawaian
- 4) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

- 5) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN

## **2. Mutasi dan Promosi ASN**

- 1) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- 2) Pengelolaan Promosi ASN

## **3. Pengembangan Kompetensi ASN**

- 1) Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
- 2) Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
- 3) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- 4) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

## **4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
- 2) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 3) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 4) Pembinaan Disiplin ASN

### **101. Program pengembangan sumber daya manusia**

#### **1. Pengembangan Kompetensi Teknis**

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

#### **2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

## **102. Program penelitian dan pengembangan daerah**

### **1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

- 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

### **2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

- 1) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
- 2) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

## **103. Program penyelenggaraan pengawasan**

### **1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

- 1) Kerjasama Pengawasan Internal
- 2) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 3) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- 4) Reviu Laporan Keuangan
- 5) Reviu Laporan Kinerja

### **2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

## **104. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi**

### **1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

## **2. Pendampingan dan Asistensi**

- 1) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 2) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
- 3) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

### **105. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**

#### **1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter

### **106. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik**

#### **1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- 2) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

**107. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**

**1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

- 1) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

**108. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya**

**1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

**109. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**

**1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

**110. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**

**1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 2) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- 3) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
- 4) Pembahasan Rancangan Perda

**2. Pembahasan Kebijakan Anggaran**

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3) Pembahasan APBD
- 4) Pembahasan APBD Perubahan
- 5) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

**3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

- 1) Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang



Infrastruktur

- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 5) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

**4. Peningkatan Kapasitas DPRD**

- 1) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- 2) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- 3) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 4) Bimbingan Teknis DPRD

**5. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**

- 1) Pengawasan Kode Etik DPRD
- 2) Penyusunan Kode Etik DPRD

**6. Fasilitasi Tugas DPRD**

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- 2) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- 3) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

**111. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**

**1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

**2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

- 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada

Masyarakat di Kecamatan

- 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

## **112. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**

### **1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

### **2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 2) Evaluasi Kelurahan
- 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

### **3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

- 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- 2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

## **113. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**

### **1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

**114. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**

**1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

**115. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**

**1. Administrasi Tata Pemerintahan**

- 1) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 2) Penataan Administrasi Pemerintahan
- 3) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

**2. Fasilitasi Kerjasama Daerah**

- 1) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

**3. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- 2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
- 3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

**4. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**

- 1) Fasilitasi Bantuan Hukum
- 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- 3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

**116. Program perekonomian dan pembangunan**

**1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**

- 1) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

## **2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**

- 1) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

## **3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

- 1) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
- 2) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

## **4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

### **117. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**

#### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

### **3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

### **4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

### **5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

- 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Mebel
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Mebel
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**9. Peningkatan Pelayanan BLUD**

- 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

**10. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

- 1) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

**11. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**

- 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

**12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

- 1) Fasilitasi Keprotokolan
- 2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

- 3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan

### **13. Penataan Organisasi**

- 1) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- 4) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 5) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

### **14. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

- 1) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 3) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

### **15. Layanan Administrasi DPRD**

- 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

#### **1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND). Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh Perangkat Daerah secara konsisten dan efektif.

##### **a) Bidang Urusan Pendidikan**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa Standar Pelayanan



Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Dengan keberadaan SPM, maka masyarakat dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebaliknya bagi pemerintah daerah, SPM dapat dijadikan sebagai alat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan aksesibilitas, kualitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat.

b) Bidang Urusan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan, bahwa dalam rangka penerapan SPM bidang kesehatan disusun standar teknis penerapan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM bidang kesehatan di tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan performance based budgeting. Dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat, setiap tahunnya pemerintah daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM. Berkenaan dengan hal tersebut, laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi penerapan SPM di bidang kesehatan tahun 2022.

c) Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kota. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang menyelenggarakan fungsi yang mendukung dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum yaitu pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

d) Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kota. SPM Bidang Perumahan Rakyat yaitu fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

e) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. SPM bidang Trantibumlinmas ini sangat penting dan harus dilaksanakan

dengan maksimal karena merupakan program prioritas nasional dan harus benar-benar diterapkan oleh Pemerintah Daerah, dalam pelatihan ini para peserta juga akan dibekali dengan simulasi dan pendalaman kasus sehingga nantinya di lapangan dapat menerapkan SPM Bidang Trantibumlinmas dengan maksimal.

f) Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM bidang sosial bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dalam menerapkan SPM merupakan manajemen pelayanan publik yaitu perencanaan, penganggaran, implementasi, serta monitoring dan evaluasi di tingkat dinas, daerah, dan unit layanan (Puskesmas) secara lebih partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif. Sampai sejauhmana penerpan SPM ini telah dilaksanakan, dan bagaimana keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.

**BAB II**  
**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**2.1. Capaian Kinerja Makro.**

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Makro**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA MAKRO</b>	<b>CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021</b>	<b>CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022</b>	<b>LAJU KINERJA (%)</b>
<b>1</b>	Indeks Pembangunan Manusia	82,04	82,71	0,81
<b>2</b>	Angka Kemiskinan	4,62	4,37	5,41
<b>3</b>	Angka Pengangguran	9,65	7,66	20,62
<b>4</b>	Pertumbuhan Ekonomi	4,21	6,32	50,11
<b>5</b>	Pertumbuhan Per kapita	90,68	100,23	10,53
<b>6</b>	Ketimpangan pendapatan (gini rasio)	0,407	0,421	-3,43

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja makro tahun 2022 dibanding capaian kinerja tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Indeks pembangunan manusia tahun 2021 sebesar 82,04 sedangkan tahun 2022 sebesar 82,71 atau mengalami perubahan 0,81%;
- b. Angka Kemiskinan tahun 2021 sebesar 4,62 sedangkan tahun 2022 sebesar 4,37. Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,41%;
- c. Angka Pengangguran tahun 2021 sebesar 9,65 sedangkan tahun 2022 sebesar 7,66. Pemerintah Kota Malang tahun 2022 dapat menurunkan secara signifikan angka pengangguran sebesar 20,62%;
- d. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 sebesar 4,21 sedangkan tahun 2022 naik menjadi 6,32 atau mengalami perubahan sebesar

50,11% (perhitungan sesuai dengan rumus pada aplikasi E-LPPD Kementerian Dalam Negeri 2021);

- e. Pertumbuhan Perkapita tahun 2021 sebesar 90,68 sedangkan data tahun 2022 sebesar 100,23 atau mengalami perubahan sebesar 10,53%;
- f. Ketimpangan pendapatan (gini rasio) tahun 2021 sebesar 0,407 sedangkan data tahun 2022 sebesar 0,421 atau mengalami perubahan sebesar -3,43%.

## 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2022 dituangkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1**  
**Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1.	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	216 Unit	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1300 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	262 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah kebutuhan	2041 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		minimal pendidik PAUD		
		Jumlah pendidik pada PAUD	2125	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	431 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	437 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	383 Unit	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan	711 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	582 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	48354 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	7696 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2185 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1767 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3540 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2139 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	283 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	526 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	532 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	418 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1480 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1016 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	238 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	104 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	104 orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	117 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	12 Unit	Dinas Pendidikan Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1789 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	171Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	185 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	133 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	238 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		calon kepala sekolah		
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	17 Orang	Dinas Pendidikan Kota Malang
<b>2</b>	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	24 Unit	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3 Unit	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0 Unit	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	0 Orang	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	0 Orang	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	0 Orang	Dinas Kesehatan Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		neonatal esensial sesuai standar		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	0 Orang	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	0 Orang	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Dinas Kesehatan Kota Malang
<b>3</b>	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan	0 Ha	Dinas PUPR- PKP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		kabupaten/kota (ha)		
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0 Meter	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0 Ha	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0 Meter	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai	0 Sarpras	Dinas PUPR- PKP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		dan sungai milik pemerintah kab/kota		
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	0%	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	97,96%	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0%	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	23 Izin	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat	4 Kerjasama	Dinas PUPR- PKP Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		dan Pemerintah Daerah lain.		
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	153971 Rumah	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	17644 Rumah	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	171743Rumah	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	4856 Rumah	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa	9534 Rumah	Dinas PUPR- PKP Kota Malang



<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		pengolahan lumpur tinja		
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	13274 Rumah	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	85,38%	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	25,64%	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	1,86%	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	76,55%	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	100%	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	59,52%	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	8,84%	Dinas PUPR- PKP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	10,94%	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	94,07%	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	398 Izin	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0 Bangunan	Dinas PUPR- PKP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	354 Bangunan	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	333 Bangunan	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1221292 KM	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Panjang jalan yang dibangun	0 KM	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Panjang jembatan yang dibangun	0 Meter	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0 KM	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	15 Meter	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Panjang jalan yang direkonstruksi/dir ehabilitasi	78432,1 KM	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	18,4 Meter	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Panjang jalan yang dipelihara	56434,59 KM	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Panjang jembatan yang dipelihara	320 Meter	Dinas PUPR-PKP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	1 Orang	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	90 Orang	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	90 Orang	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang	0	Dinas PUPR- PKP Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		bersumber dari APBN		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja	1	Dinas PUPR- PKP Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		(LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	760	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	760	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	81	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha,	1	Dinas PUPR- PKP Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0 Badan Usaha	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0 Badan Usaha	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat	0 Badan Usaha	Dinas PUPR- PKP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		dalam proyek di wilayah Kab/Kota		
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	81 Badan Usaha	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0 Izin	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 Pengawasan	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 Kecelakaan Konstruksi	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau	266 Pengawasan	Dinas PUPR-PKP Kota Malang



<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
<b>4</b>	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	19,227 Rumah	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	460 Rumah	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	87 Orang	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	1 Rumah	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0 Rumah	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0 Rumah	Dinas PUPR-PKP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0 Unit	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	87 Orang	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0 Ha	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0 Rumah Tangga	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0 Rumah Tangga	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan	0 Rumah Tangga	Dinas PUPR- PKP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		rencana pemenuhan SPM		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0 Rumah Tangga	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0 Rumah Tangga	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0 Ha	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	608,6 Ha	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	580 Unit	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	113,04 Ha	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah rumah di kab/kota	201150 Rumah	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah unit PK RTLH	580 Rumah	Dinas PUPR- PKP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah rumah tidak layak huni	1511 Rumah	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	3671 Rumah	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Rasio rumah dan KK	139,90%	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah rumah pembangunan baru	10353 Rumah	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	152 Perumahan	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	34019 Rumah	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	34019 Rumah	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	34019 Rumah	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	346 Perumahan	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	34019 Rumah	Dinas PUPR-PKP Kota Malang
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0 Pengembang	Dinas PUPR-PKP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	0 Pengembang	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	150 Pengembang	Dinas PUPR- PKP Kota Malang
<b>5</b>	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	104 Pelanggaran dan Pengaduan	Data IKK Tratibumlinmas
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	3100 Orang	Data IKK Tratibumlinmas
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	15 Perda & Perkada	Data IKK Tratibumlinmas
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5 Orang	Data IKK Tratibumlinmas
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	43 SOP	Data IKK Tratibumlinmas
		Tersedianya sarana prasarana minimal	887	Data IKK Tratibumlinmas
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	Data IKK Tratibumlinmas

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	11,94%	Data IKK Tratibumlinmas
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	Data IKK Tratibumlinmas
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	Data IKK Tratibumlinmas
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	10,12%	Data IKK Tratibumlinmas
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	10,12%	Data IKK Tratibumlinmas
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	5,08%	Data IKK Tratibumlinmas
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	1,38%	Data IKK Tratibumlinmas

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	Data IKK Tratibumlinmas
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0	Data IKK Tratibumlinmas
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	Data IKK Tratibumlinmas
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	Data IKK Tratibumlinmas
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	423 Layanan	Data IKK Tratibumlinmas
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	Data IKK Tratibumlinmas

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	Data IKK Tratibumlinmas
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0 Pos	Data IKK Tratibumlinmas
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	508 Sarpras	Data IKK Tratibumlinmas
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	37 Orang	Data IKK Tratibumlinmas
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat	28 Orang	Data IKK Tratibumlinmas



<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	38 Kegiatan	Data IKK Tratibumlinmas
<b>6</b>	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1 Layanan	Dinas Sosial- P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	45268 Orang	Dinas Sosial- P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0 Tim	Dinas Sosial- P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	45335 Orang	Dinas Sosial- P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2 Unit	Dinas Sosial- P3AP2KB Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	714 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	3 Unit	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	30 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	3 Peralatan	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	6 Paket	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	56 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	4 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	214 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia	817 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	100 Kegiatan	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	22 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	39 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	53 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	63 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	28 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	345 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0 Penampungan	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	214 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
<b>7</b>	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	Dinasker-PMPPSP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	64,69%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0 Perusahaan	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Persentase instruktur bersertifikatkompetensi	27,31%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	6,04%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Persentase LPK yang terakreditasi	52,27%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah penganggur yang dilatih	415 Orang	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Persentase penyerapan lulusan	23,61%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Lulusan bersertifikat kompetensi	98,80%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	100%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Data tingkat produktivitas total	3,52	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	12,68%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	18,18%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di	4 SP/SB	Dinasker-PMPPSP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	100%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	73,09%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,81%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah mogok kerja	0	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah perselisihan PHK	24	Dinasker-PMPPSP Kota Malang



<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	586 Orang	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	3	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	50%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	595 Orang	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	903 BKK	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	36 Orang	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	76 Orang	Dinasker-PMPPSP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	4 Orang	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0 Lembaga	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	137 Perjanjian	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0 Orang	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	18,28%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	186 Orang	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon	33,33%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan		
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	100%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0%	Dinasker-PMPPSP Kota Malang
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	85	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	52	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	28	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	84%	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	30	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	16	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	24	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah kader perempuan tingkat	114 Orang	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		kabupaten/kota yang sudah dilatih		
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	24	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	24%	Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang
<b>8</b>	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk	1	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		penyimpanan cadangan pangan		
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	1	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	3	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Tertanganinya kerawanan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	15	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>9</b>	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0%	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0%	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee.	0%	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Dokumen Izin membuka tanah	0%	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0%	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
<b>10</b>	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	29,26	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ( IKA, IKU,IKL )
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,3	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ( IKA, IKU,IKL )
		Hasil perhitungan provinsi terhadap	58	Data Indeks Kualitas

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Indeks tutupan hutan (ITH)		Lingkungan Hidup ( IKA, IKU,IKL )
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	202226,44	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ( IKA, IKU,IKL )
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	2%	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ( IKA, IKU,IKL )
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	40%	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ( IKA, IKU,IKL )
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ( IKA, IKU,IKL )
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga	0	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ( IKA, IKU,IKL )



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		kemasyarakatan yang diberikan diklat		
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan	0%	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ( IKA, IKU, IKL )
<b>11</b>	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	263%	Dispendukcapil Kota Malang
		Penerbitan akta perceraian	%	Dispendukcapil Kota Malang
		Penerbitan akta kematian	8510%	Dispendukcapil Kota Malang
		Penyajian data kependudukan	1%	Dispendukcapil Kota Malang
<b>12</b>	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0 Desa	Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja	0 Desa	Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		sama antar desa tahun sebelumnya		
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0 Lembaga	Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0 Desa	Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang
<b>13</b>	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	Dinsos-P3AP2KB
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25,23	Dinsos-P3AP2KB
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	44,92	Dinsos-P3AP2KB
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	35,44%	Dinsos-P3AP2KB

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah stakeholders/pem angku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	14 Stakeholder	Dinsos-P3AP2KB
		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	Dinsos-P3AP2KB
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	74,62%	Dinsos-P3AP2KB
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	95,06	Dinsos-P3AP2KB
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	17,29%	Dinsos-P3AP2KB
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	29,82%	Dinsos-P3AP2KB
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	92,75%	Dinsos-P3AP2KB

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>14</b>	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	45,45	Dinas Perhubungan Kota Malang
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	83,31	Dinas Perhubungan Kota Malang
		Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	Dinas Perhubungan Kota Malang
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100	Dinas Perhubungan Kota Malang
<b>15</b>	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas	100%	Diskominfo Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		yang disediakan Dinas Kominfo		
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0	Diskominfo Kota Malang
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi	100%	Diskominfo Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	36%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3750%	Diskominfo Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%	Diskominfo Kota Malang
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	0	Diskominfo Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	5769%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	50%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	7619%	Diskominfo Kota Malang
16	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	1,68%	Diskopindag Kota Malang



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		dalam daerah kabupaten/kota		
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	58,17%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	88,55%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	89,74%	Diskopindag Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	8,01%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	54,97%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi	8,01%	Diskopindag Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,01%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	19,07%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,20%	Diskopindag Kota Malang
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru	1,50%	Diskopindag Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		yang berskala mikro		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	100%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,25%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,53%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	7,02%	Diskopindag Kota Malang
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1,51%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	7,47%	Diskopindag Kota Malang
<b>17</b>	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	Disnaker-PMPTSP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0 Laporan	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1 Kegiatan	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Kegiatan pameran penanaman modal	1 Kegiatan	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	6 Kegiatan	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	2237 Konsultasi	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	28403 Izin	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Laporan realisasi penanaman modal	7,00354E+11	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	334 Aparatur	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	142Perusahaan	Disnaker-PMPTSP Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	100	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
<b>18</b>	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0 Orang	Disporapar Kota Malang
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0 Orang	Disporapar Kota Malang
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	0 Orang	Disporapar Kota Malang
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0 Orang	Disporapar Kota Malang
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	0 Orang	Disporapar Kota Malang
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0 Event/Kegiatan	Disporapar Kota Malang
<b>19</b>	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	0	Diskominfo Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0 Survey	Diskominfo Kota Malang
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0 Kompilasi	Diskominfo Kota Malang
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0 Survey	Diskominfo Kota Malang
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0 Kompilasi	Diskominfo Kota Malang
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	7143%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	7573%	Diskominfo Kota Malang
<b>20</b>	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2	4,17%	Diskominfo Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah		
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0%	Diskominfo Kota Malang
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100%	Diskominfo Kota Malang
<b>21</b>	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	0	Disdikbud Kota Malang
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian,	0	Disdikbud Kota Malang



<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		penayaan keberagaman)		
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	0	Disdikbud Kota Malang
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0 Orang	Disdikbud Kota Malang
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	0	Disdikbud Kota Malang
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	0	Disdikbud Kota Malang
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke	0	Disdikbud Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		luar provinsi dengan dukungan data		
		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	Disdikbud Kota Malang
		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	Disdikbud Kota Malang
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0 Koleksi	Disdikbud Kota Malang
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0 Orang	Disdikbud Kota Malang
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Disdikbud Kota Malang
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0 Tim	Disdikbud Kota Malang
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0 Tim	Disdikbud Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0 Orang	Disdikbud Kota Malang
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0 Orang	Disdikbud Kota Malang
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota	0 Orang	Disdikbud Kota Malang
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0 Unit	Disdikbud Kota Malang
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0 Kegiatan	Disdikbud Kota Malang
<b>22</b>	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	98,64%	DATA BUKTI DUKUNG
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	1431,66%	DATA BUKTI DUKUNG
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,04%	DATA BUKTI DUKUNG
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	90,86%	DATA BUKTI DUKUNG
		Jumlah masyarakatange	8 Kegiatan	DATA BUKTI DUKUNG

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		mar membaca di masyarakat		
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	DATA BUKTI DUKUNG
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	DATA BUKTI DUKUNG
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	2,22	DATA BUKTI DUKUNG
<b>23</b>	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	29,92%	DATA BUKTI DUKUNG
		persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	84,33%	DATA BUKTI DUKUNG
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	87,50%	DATA BUKTI DUKUNG
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	32,54%	DATA BUKTI DUKUNG
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2000 Arsip	DATA BUKTI DUKUNG
		Perlindungan dan penyelamatan	1766 Arsip	DATA BUKTI DUKUNG

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0 Arsip	DATA BUKTI DUKUNG
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0 Arsip	DATA BUKTI DUKUNG
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0%	DATA BUKTI DUKUNG
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0 Arsip	DATA BUKTI DUKUNG
<b>24</b>	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan	0	Dinas Ketahanan Pangan &

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		diversifikasi usaha (RTP)		Pertanian Kota Malang
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	13 Izin	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	637 Pembudidayaan	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	2690100 Ekor	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
25	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	0 Kawasan	Disporapar Kota Malang
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas	0 Sarpras	Disporapar Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		umum, dan fasilitas pariwisata		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0 TDUP	Disporapar Kota Malang
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0 Orang	Disporapar Kota Malang
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0 Kegiatan	Disporapar Kota Malang
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0 Kegiatan	Disporapar Kota Malang
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0 Industri	Disporapar Kota Malang
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0%	Disporapar Kota Malang
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0%	Disporapar Kota Malang
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0 Lokasi	Disporapar Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>26</b>	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	23 Unit	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Prasarana pertanian yang digunakan	2 Unit	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Penerbitan izin usaha pertanian	0 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Persentase prasarana yang digunakan	100%	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	82,14%	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0%	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
<b>27</b>	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	DLH Kota Malang
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	DLH Kota Malang
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0 Ha	DLH Kota Malang



<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0 Kejadian	DLH Kota Malang
<b>28</b>	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	DLH Kota Malang
<b>29</b>	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0%	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	0%	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Persentase penerbitan TDG	100%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	10,61%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	100%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0%	Diskopindag Kota Malang

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	1%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	1,19%	Diskopindag Kota Malang
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0,00%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	78%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0%	Diskopindag Kota Malang
<b>30</b>	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Diskopindag Kota Malang
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan	50%	Diskopindag Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		ditetapkannya menjadi PERDA		
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	1,85%	Diskopindag Kota Malang
<b>31</b>	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0 Kawasan	Tidak dilaksanakan pada Pemerintah Kota Malang
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0 Permukiman	Tidak dilaksanakan pada Pemerintah Kota Malang
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0 Permukiman	Tidak dilaksanakan pada

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				Pemerintah Kota Malang

### 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2021 dituangkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil yang terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Outcome**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	89,41%	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,01%	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	88,28%	Dinas Pendidikan Kota Malang
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum	80,35%	Dinas Pendidikan Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,3496314	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	66,67%	Mengikuti definisi operasional bahwa Rumah Sakit terakreditasi minimal status madya
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	85,12%	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	87,89%	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	91,73%	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	85,53%	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	82,66%	Dinas Kesehatan Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		pelayanan kesehatan sesuai standar		
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	73,87%	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	52,88%	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56,19%	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	109,29%	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	91,66%	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	113,46%	Dinas Kesehatan Kota Malang
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	70,68%	Dinas Kesehatan Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0%	Dinas PUPR-PKB Kota Malang
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0%	Kota Malang Tidak Memiliki Wilayah Pantai
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	98,29%	Dinas PUPR-PKB Kota Malang
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	95,82%	Dinas PUPR-PKB Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85,38%	Dinas PUPR-PKB Kota Malang
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	0%	Dinas PUPR-PKB Kota Malang
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	98,88%	Dinas PUPR-PKB Kota Malang
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	104,04%	Dinas PUPR-PKB Kota Malang
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas PUPR-PKB Kota Malang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	50%	Dinas PUPR-PKB Kota Malang
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	Tidak ada program relokasi rumah di tahun 2022
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	93,08%	Dinas PUPR-PKB Kota Malang



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,7511807	Dinas PUPR-PKB Kota Malang
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	16,91%	Dinas PUPR-PKB Kota Malang
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satuan Polisi Pamongpraja Kota Malang
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satuan Polisi Pamongpraja Kota Malang
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	11,94%	Total warga negara yg bermukim di wilayah rawan bencana adalah 46.360 jiwa yg dibagi rata targetnya per tahun (dalam 5 tahun masa Renstra) menjadi 9.272 jiwa
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16,58%	1. Yg mendpt layanan pencegahan & kesiapsiagaan adalah total dari warga yg dapat pelatihan, layanan Pusdalops, dan peralatan perlindungan. 2. Total warga negara yg bermukim di wilayah rawan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
				bencana adalah 46.360 jiwa yg dibagi rata targetnya per tahun
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1. Jumlah seluruh korban bencana tahun 2022 adalah 347 jiwa 2. Jumlah korban yg diselamatkan tahun 2022 adalah 347 jiwa
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	DPBD Kota Malang
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,62 Menit	DPBD Kota Malang
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	10,98%	Dinsos-P3AP2KB Kota Malang
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinsos-P3AP2KB Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	83,33%	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,55%	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	12748697860,6 17 Ket. D	BPS Kota Malang
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	12,99%	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	59,58%	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5,96%	Dinsos-P3AP2KB Kota Malang
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	Dinsos-P3AP2KB Kota Malang
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000)	5,65%	jumlah penduduk perempuan mengambil dari

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		penduduk perempuan)		data BPS Tahun 2021
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	0	Tidak Ada
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	DPUPR-PKP Kota Malang
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	DPUPR-PKP Kota Malang
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100%	DPUPR-PKP Kota Malang
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	DPUPR-PKP Kota Malang
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100%	DPUPR-PKP Kota Malang
		Penangan sengketa tanah garapan yang	0%	DPUPR-PKP Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		dilakukan melalui mediasi		
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	56,31%	CAPAIAN IKLH TAHUN 2022 (IKA, IKU, dan IKL
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	98,090245	Capaian pengelolaan sampah Kota Malang Tahun 2022
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ; terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	55,71%	Data ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Tahun 2022
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	98,81%	Dispendukcapil
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	61,48%	Dispendukcapil
		Kepemilikan akta kelahiran	97,57%	Dispendukcapil
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	53,57%	Dispendukcapil
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	Kota Malang tidak memiliki desa
		Persentase peningkatan	100	Kota Malang tidak memiliki desa

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		status desa mandiri		
		TFR (Angka Kelahiran Total)	1,5	Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	74,62%	Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	19,19%	Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang
14	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,72	Dinas Perhubungan Kota Malang
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	12,5	Dinas Perhubungan Kota Malang
15	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	-
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	37,50%	-
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	69,76%	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		
16	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	33,97%	Koperasi yang melaksanakan RAT
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1,51%	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha
17	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	4,87%	Disnaker-PMPTSP Kota Malang
18	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,67%	Disporapar Kota Malang
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	25,15%	Disporapar Kota Malang
		Peningkatan prestasi olahraga	66 Medali/Penghargaan	Disporapar Kota Malang
19	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	-
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	-
20	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	14,57%	Diskominfo Kota Malang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
21	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Malang
22	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	6010,00%	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	222	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sesnsus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)
23	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	58,57	Dispussipda Kota Malang
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan	627,66	Dispussipda Kota Malang



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		
24	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	92,45%	Dispusipda Kota Malang
25	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0%	Disporapar Kota Malang
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	43,05%	Disporapar Kota Malang
		Tingkat hunian akomodasi	29677,59%	Sudah diupload yang ada Stempel Dinas
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,72%	Disporapar Kota Malang
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7,95%	Data Masih Menunggu Proses Verifikasi dari BKAD Kota Malang
26	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	741,05%	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Malang
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus	0	Dinas Ketahanan Pangan &

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota		Pertanian Kota Malang
27	Kehutanan		0	Kota Malang tidak memiliki Tahura
28	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	Di Kota Malang tidak ada perusahaan yang memanfaatkan panas bumi
29	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0,51%	Pendataan UMKM di Diskopindag terpusat di Bidang Usaha Mikro
		Persentase kinerja realisasi pupuk	99,41%	-
		Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	Diskopindag Kota Malang
30	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	35,54%	35.54%ta IKM th.2021=5920 data IKM tahun 2022= 8024
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang	44%	Dokumen RIPIP dasar hukumnya Pergub No.58 Tahun 2019 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		ditetapkan dalam RPIP		DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2039 Pasal 4 ayat 1 Dokumen RIPIK Ranperda Kota
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Diskopindag Kota Malang
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0%	Pada TA.2021 telah dilaksanakan Kajian tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau dan hasilnya bahwa Kota Malang tidak layak didirikan Kawasan.
		Tersedianya informasi industri secara lengkap	35%	Terkait informasi data yang ada do

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		dan terkini		SIINAS keterangan ada di Lamp.Surket
31	Transmigrasi		0 Kawasan	Tidak dilaksanakan pada Pemerintah Kota Malang

### 2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2021 dituangkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome fungsi penunjang urusan pemerintahan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.2.3**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**  
**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	30.66%	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
		Rasio PAD;	34.46%	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Penilaian 29 Desember 2021 oleh BPKP dengan nilai 3,634

		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Hasil dari penilaian BPKP
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	100.00%	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
		Opini Laporan Keuangan	10	Opini WTP dari BPK
<b>7</b>	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	0%
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	5.76%	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Malang
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	60.64%	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Malang
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha	11.53%	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota

		Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		Malang
	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	90.43%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Malang
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16.06%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Malang
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25.65%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Malang
	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5.13%	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD	16.33%	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

		dalam APBD		
		Manajemen Aset	9.779349708906,4	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	11.86%	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
Transparansi dan Partisipasi Publik		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) &	82.70%	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal informatio)	100%	BKAD Kota Malang

### 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran dilakukan terhadap capaian tahun 2022, terhadap capaian tahun sebelumnya dan terhadap target jangka menengah. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2022 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya **101,52%** dari target. Keberhasilan tersebut merupakan buah upaya Kota Malang untuk bangkit dari bencana non-alam berupa pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor perekonomian. Adaptasi terhadap kondisi *new normal* membuat Pemerintah Kota Malang lebih berinovasi dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Walaupun demikian, masih terdapat indikator yang tidak berhasil mencapai di antaranya adalah Indeks Kematangan SPBE. Selain itu, indikator yang masih kurang maksimal pencapaiannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) dan Persentase Penurunan PMKS. Sedangkan indikator lain, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), Indeks pembangunan Gender (IPG), dan Nilai Sakip walaupun capaiannya masih kurang maksimal, namun capaiannya sudah di atas 90%. Belum maksimalnya penurunan PMKS dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang juga tidak lepas dari dampak COVID-19 yang berkelanjutan mulai tahun 2020, dan masih dalam tahap pemulihan. Akan tetapi perlu analisa mendalam terkait angka pengangguran karena terjadi perubahan pola perdagangan yang dulu terbiasa *offline* dan memiliki kantor sekarang menjadi lebih banyak *online* meskipun hanya bekerja di rumah. Perhitungan para pekerja di rumah ini apakah menjadi kategori pengangguran atau tidak masih perlu analisa mendalam. Untuk mendukung capaian kinerja tahun berikutnya, Pemerintah Kota Malang telah melakukan reviu prioritas pembangunan, penekanan strategi pada pemulihan ekonomi maupun target kinerja sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan pada akhir RPJMD Tahun



2018-2023.

### 2.3.1 Target kinerja dalam perjanjian kinerja.

Target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3.1**  
**Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Target</b>
<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya</b>	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,10
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,10
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power parity</i>	85,10
<b>Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan</b>	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,30%
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	4,35
	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	67,60

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Target</b>
<b>Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender</b>	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,50%
		Persentase penurunan PMKS	5,00%
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan masyarakat (IPMas)	0,884
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,10
	<b>Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel</b>	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase Perda yang ditegakkan
Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif		Nilai SAKIP	83,5
		Opini BPK	WTP
		Maturitas SPIP	3,150
		Rasio PAD	0,30
Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN		Indeks Profesionalitas ASN	75,84
Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi		Indeks Kematangan SPBE	4,45

### 2.3.2 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3.2**  
**Pengukuran Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Visi</b>	<b>Kota Malang Bermartabat</b>				
<b>MISI 1</b>	<b>Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Dasar lainnya Bagi Semua Warga</b>				
<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya</b>	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,10	79,41	103,00%
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,10	82,69	100,72%
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power parity</i>	85,10	86,16	101,25%
<b>MISI 2</b>	<b>Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan, dan keterpaduan</b>				
<b>Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan</b>	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,30%	10,01%*	158,89%
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	4,35	4,36	100,23%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	67,60	56,31	83,30%
<b>MISI 3</b>	<b>Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan keberagaman dan keperpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender</b>				
<b>Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender</b>	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,50	7,66	97,87%
		Persentase penurunan PMKS	5%	3,76%*	75,20%
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan masyarakat (IPMas)	0,884	0,8483	95,96%
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,10	95,24*	98,08%
<b>MISI 4</b>	<b>Memastikan Kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel</b>				
<b>Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel</b>	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase Perda yang ditegakkan	82%	100%	121,95%
	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Nilai SAKIP	83,5	80,7	96,65%
		Opini BPK	WTP	WTP	100%
		Maturitas SPIP	3,150	3,634*	115,37%
		Rasio PAD	0,30	0,34	113,33%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	75,84	76,32	100,63%
	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,45	2,6	58,43%

Capaian kinerja sasaran strategis sebagian besar sudah mencapai target dan ada yang melebihi target. Akan tetapi masih ada kinerja yang belum dapat berhasil mencapai target yaitu pada sasaran meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup dengan indikator IKLHD, sasaran meningkatnya kualitas perlindungan sosial dengan indikator persentase penurunan PMKS belum dapat tercapai secara maksimal karena perlu *update* komponen Fakir Miskin yang mengacu pada data kesejahteraan sosial, sedangkan untuk sasaran meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi dengan indikator Indeks Kematangan SPBE masih jauh dari target karena domain tata kelola dan manajemen SPBE masih dibawah angka 2 (dua).

### **2.3.3 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan capaian kinerja tahun 2021 dan *baseline* tahun 2018 diperlukan untuk mengetahui peningkatan kinerja yang ditunjukkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3.3**

**Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya**

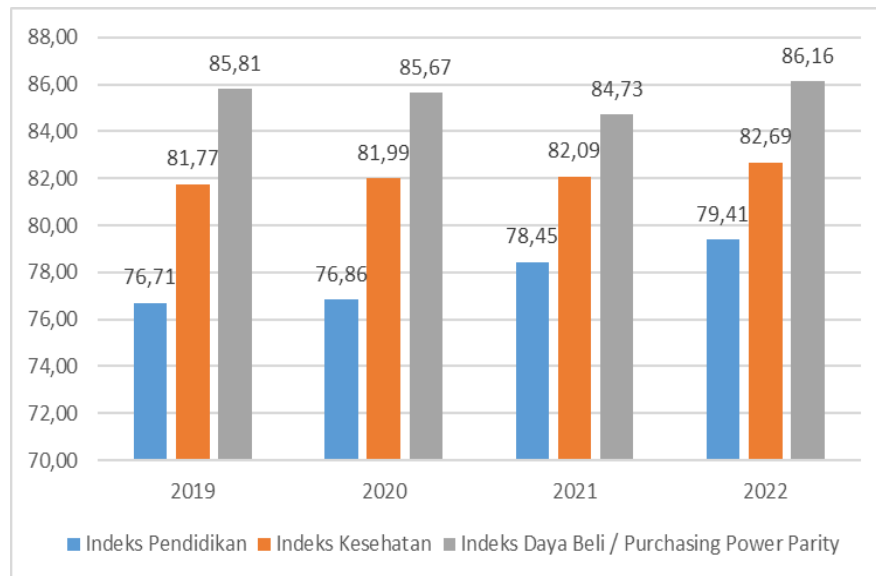
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2018	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<b>Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter</b>	Indeks Pendidikan	0,77	77	77,1	78,45	79,41	101,88%	103%
<b>Meningkatnya kualitas layanan kesehatan</b>	Indeks Kesehatan	0,81	81,8	82,1	82,09	82,69	100,35%	100,72%
<b>Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan</b>	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,85	85	85,1	84,73	86,16	99,68%	101,25%
<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif</b>	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	N/A	6,20%	6,30%	4,96%	10,01%	80,00%	158,89%
<b>Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu</b>	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,75	4,20	4,35	4,23	4,36	100,71%	100,23%
<b>Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,15	67,57	67,60	60,46	56,31	89,48%	83,30%
<b>Meningkatnya kualitas perlindungan sosial</b>	Persentase Penurunan PMKS	-2,23%	5,00%	5,00%	-0,42%	3,76%	0,00%	75,20%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	N/A	8,20%	7,50%	9,65%	7,66%	82,32%	97,87%
<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan</b>	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,820	0,868	0,884	0,8415	0,8483	96,95%	95,96%
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	95,25	97,00	97,10	95,24	95,24	98,18%	98,08%
<b>Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum</b>	Persentase perda yang ditegakkan	21%	60%	82%	100%	100%	166,67%	121,95%
<b>Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif</b>	Nilai Sakip	6,8	82,05	83,5	80,1	80,7	97,56%	96,65%
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%	100,00%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2018	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Maturitas SPIP	3,18	3,10	3,150	3,634	3,634	117,23%	115,37%
	Rasio PAD	0,22	0,28	0,30	0,28	0,34	100%	113,33%
<b>Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN</b>	Indeks Profesionalisme ASN	64	74,38	75,84	74,68	76,32	100,40%	100,63%
<b>Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi</b>	Indeks Kematangan SPBE	2,44	4,21	4,45	2,73	2,6	64,84%	58,43%

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kinerja Kota Malang mengalami kenaikan terutama kenaikan terbesar adalah pada persentase pertumbuhan ekonomi kreatif dimana tahun 2022 menjadi 10,01% dari 4,96%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Malang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi kreatif dan inovasi Kota Malang dalam membangun **Malang Creative Center (MCC)** sebagai wadah aktivitas/fasilitas pelaku ekonomi kreatif turut berhasil dalam meningkatkan aktivitas ekonomi. Selain itu inovasi Kota Malang untuk mengangkat dan menambah nilai suatu kawasan yang kumuh tapi bersejarah melalui kolaboratif/*cross cutting* infrastruktur, pariwisata dan usaha mikro dapat mewujudkan sebuah kawasan baru yaitu **Kayutangan Heritage** dimana sebuah kawasan kumuh menjadi kawasan dengan nilai tambah untuk perekonomian baru dan tetap melestarikan budaya asli Malang. Kedua inovasi ini dapat mengangkat para pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang. Meskipun demikian untuk kinerja yang mengalami penurunan masih diperlukan upaya-upaya perbaikan.

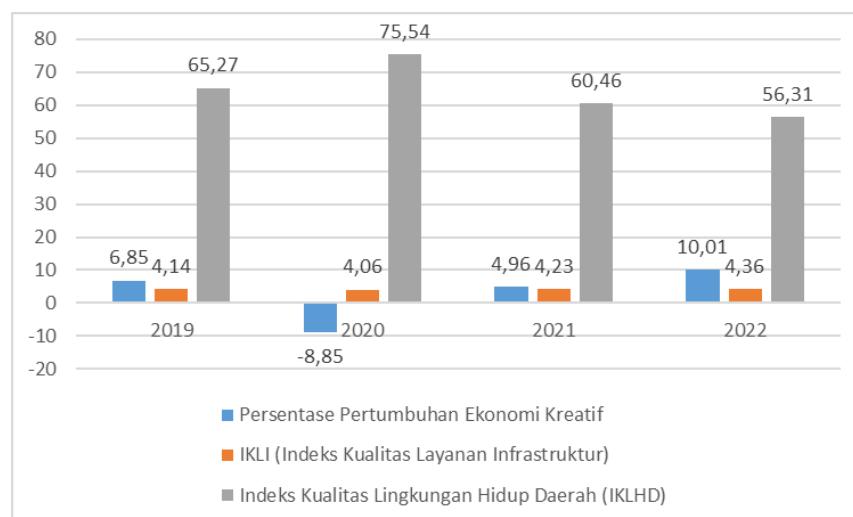
Selain itu sebagai informasi dalam perbaikan perencanaan berikutnya perlu gambaran progres kinerja selama periode RPJMD maka dibandingkan realisasi kinerja mulai tahun 2019 s.d. 2022 sebagaimana gambar dibawah ini:

**Gambar 2.1 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2022**



Dari gambar diatas, indikator sasaran meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter yaitu indeks pendidikan, indikator sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan yaitu indeks kesehatan, dan indikator sasaran meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan yaitu indeks daya beli meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kota Malang dalam rangka terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya telah berhasil.

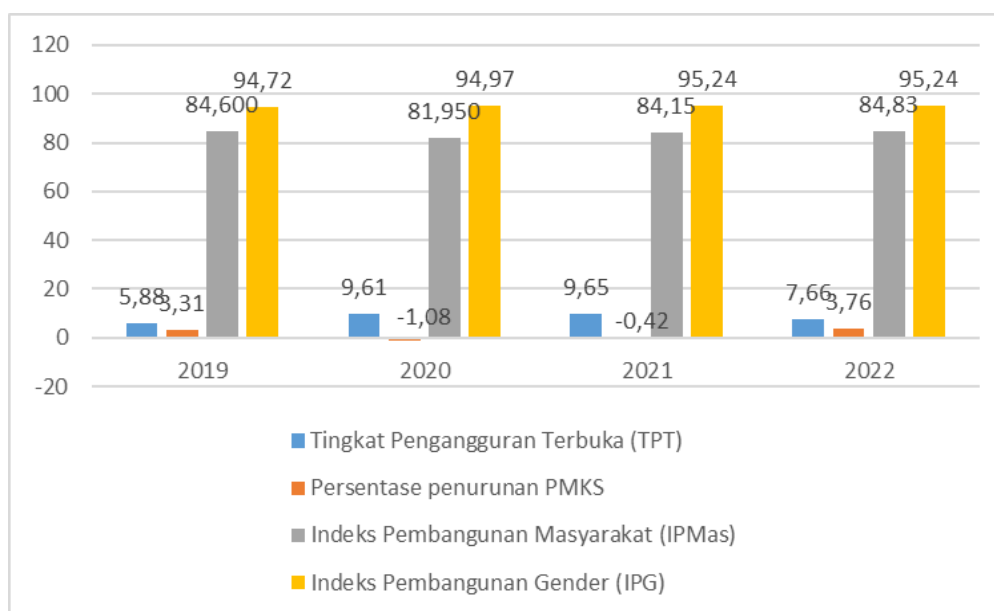
**Gambar 2.2 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2022**





Dari gambar diatas, indikator sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif yaitu pertumbuhan ekonomi kreatif naik sangat signifikan, sedangkan indikator sasaran meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup yaitu IKLHD mengalami penurunan.

**Gambar 2.3 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2022**



Dari gambar diatas, kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat signifikan yang tahun 2021 sebesar 9,65 menjadi 7,66. Hal ini tidak lepas atau beririsan dengan inovasi Kota Malang dalam meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif karena daya saing Kota Malang adalah pada para pelaku ekonomi kreatif yang tumbuh dan aktif serta meningkat aktivitasnya yang didukung oleh program kerja pemerintah Kota Malang dan menjadikan wirausaha baru sebagai target kinerja.

**Tabel 2.3.4**

### Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	26,37	54	100	100
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai SAKIP	75	80,05	80,10	80,70
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	Maturitas SPIP	3,045	3,045	3,634	3,634
	Rasio PAD	0,3	0,25	0,28	0,34
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	66,61	67,06	74,68	76,32
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,85	3,7	2,73	2,6

Sebagai bentuk informasi capaian indikator kinerja makro yang dituangkan dalam indikator tujuan daerah dan progres pencapaian kinerja 5 (lima) tahun periode RPJMD untuk menunjukkan *ultimate outcome/outcome finish* dari Kepala Daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah.

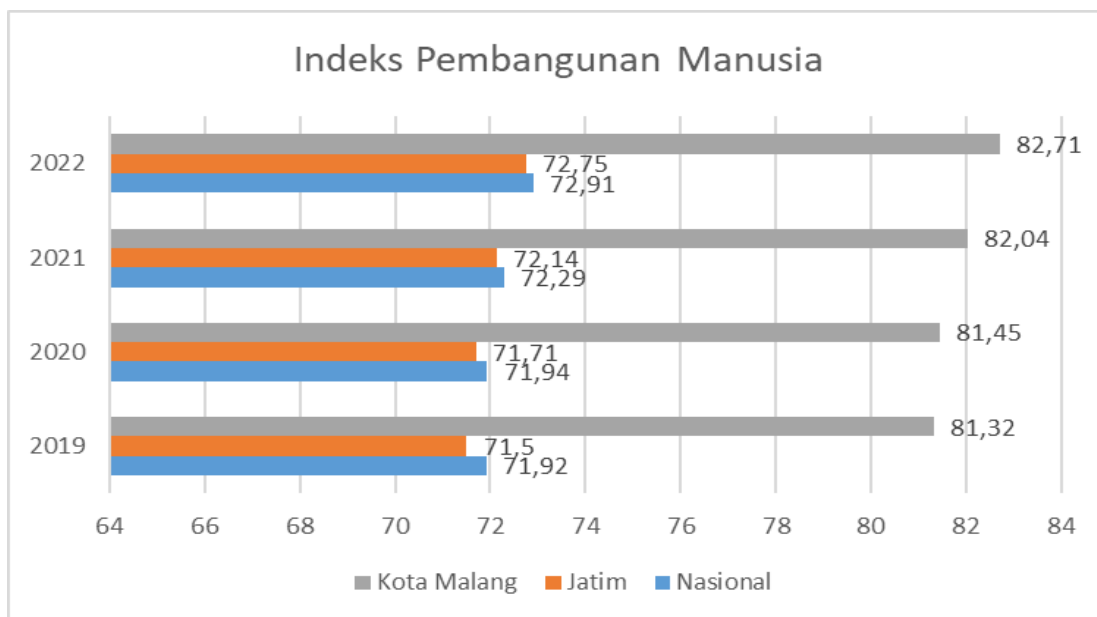
**Tabel 2.3.5**

### Realisasi Indikator Kinerja Tujuan terhadap Target Tahun 2023

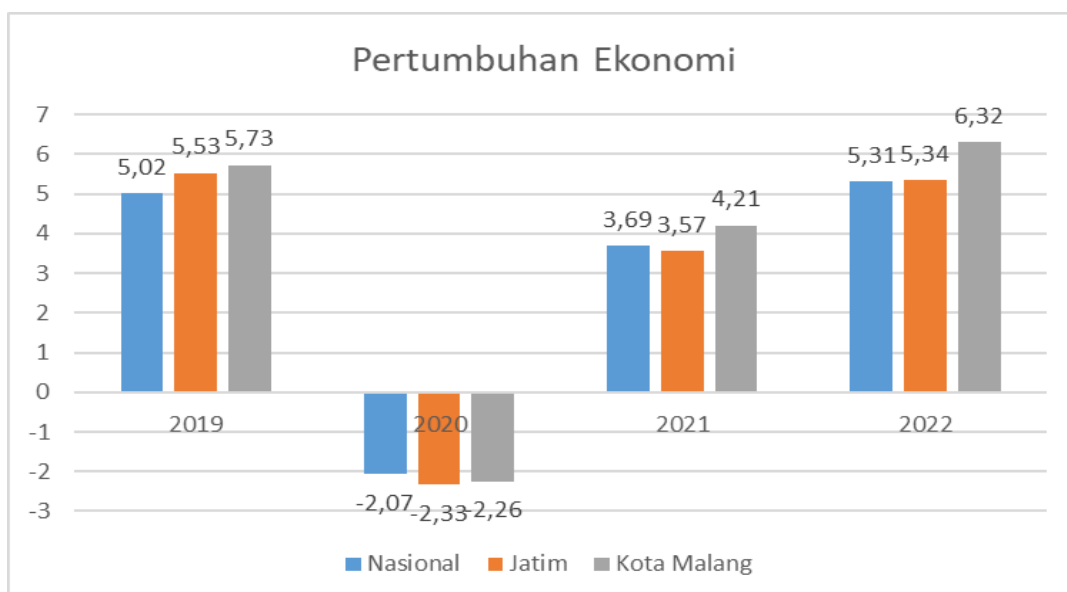
Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi s.d. 2022	Capaian s.d. 2022
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,248	82,71	101%
Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,80%	6,32%	109%
	Gini Rasio	0,39	0,421	108%
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Angka Kemiskinan	3,77%	4,37%	84,08%
	Indeks Modal Sosial	90	83,57	93%
Terwujudnya Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib Hukum, profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	73,51	72,07	98%

Sebagai profil kinerja Pemerintah Kota Malang maka perlu dibandingkan/*benchmarking* kinerja dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar dibawah ini:

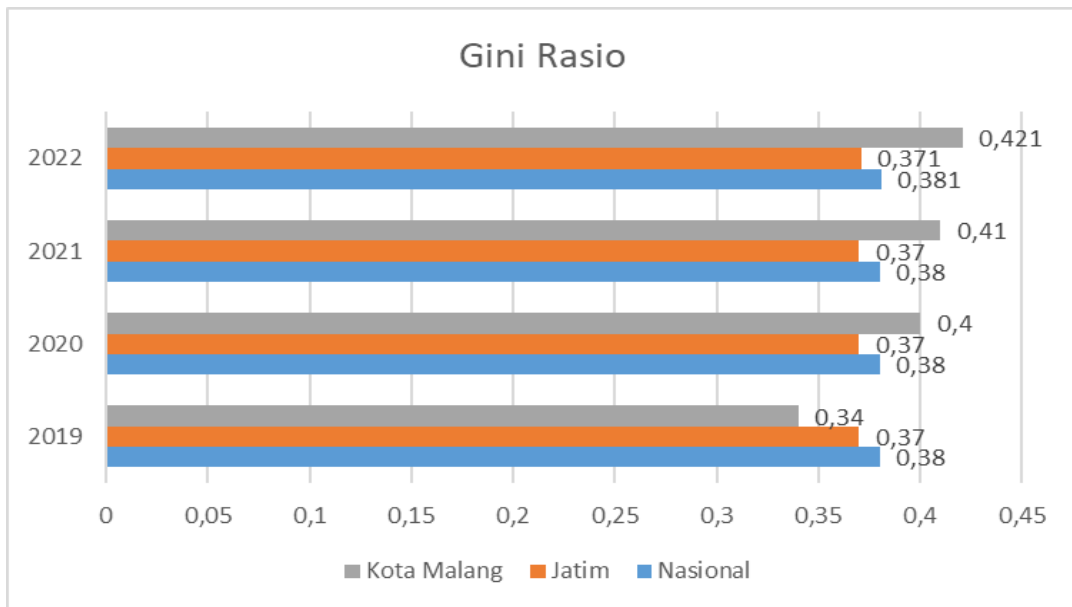
**Gambar 2.4 Benchmark kinerja IPM Tahun 2019-2022**



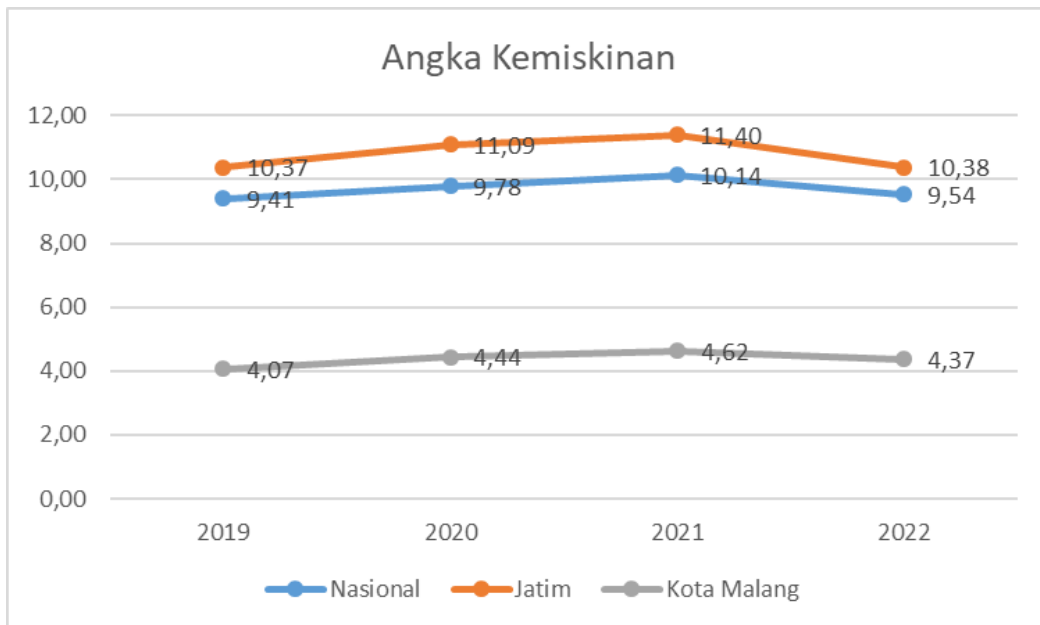
**Gambar 2.5 Benchmark kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2022**



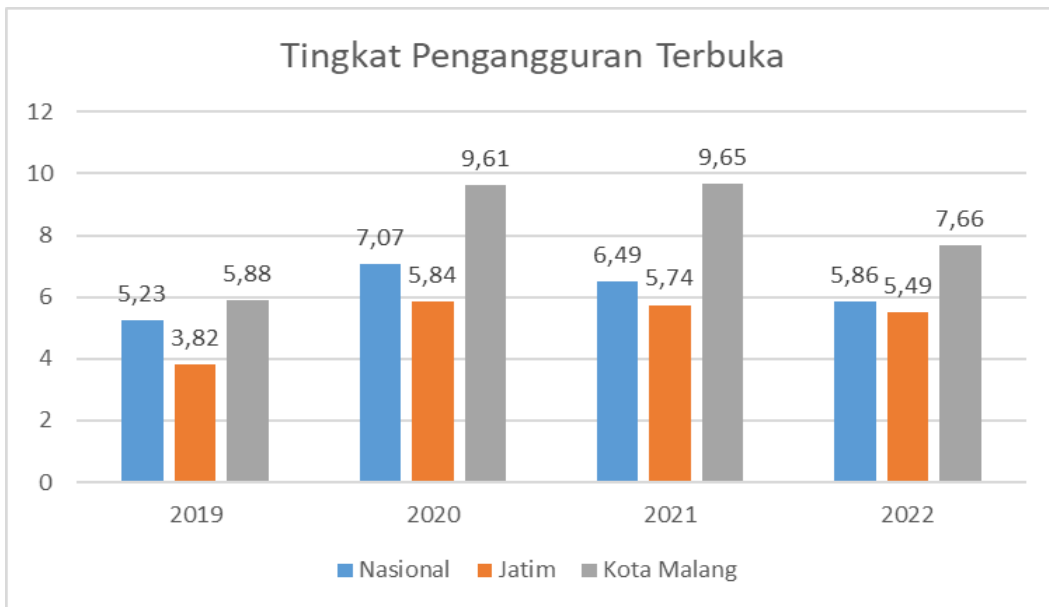
**Gambar 2.6 Benchmark kinerja Gini Rasio  
Tahun 2019-2022**



**Gambar 2.7 Benchmark kinerja Angka Kemiskinan  
Tahun 2019-2022**



**Gambar 2.8 Benchmark kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2022**



Sebagian besar kinerja Pemerintah Kota Malang jika dibandingkan/*benchmark* kinerja dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional masih di atas rata-rata kecuali Gini rasio dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Kedua indikator makro ini menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh Kota Malang meskipun banyak variabel yang tidak bisa diintervensi secara langsung oleh Kota Malang termasuk dalam perhitungannya, dimana Kota Malang adalah kota strategis yang menjadi tempat perdagangan, pendidikan dan perputaran perekonomian sehingga mendapatkan bonus demografi dari daerah di sekitarnya dan menjadi objek dalam perhitungan kedua indikator dimaksud.

**2.3.1 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah.**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan target RPJMD tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3.6**

**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan Target  
RPJMD Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	CAPAIAN
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,2	79,41	102,86%
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,3	82,69	100,47%
3	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,2	86,16	101,13%
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,45%	10,01%	155,19%
5	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,5	4,36	96,89%
6	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,63	56,31	83,26%
7	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,24%	7,66%	77,24%
		Persentase Penurunan PMKS	5,00%	3,76%	75%
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,9	0,8483	94,26%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	CAPAIAN
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	<b>stabilitas lingkungan</b>	Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,2	95,24	97,98%
<b>9</b>	<b>Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum</b>	Persentase perda yang ditegakkan	100%	100%	100,00%
<b>10</b>	<b>Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif</b>	Nilai Sakip	84,9	80,7	95,05%
		Opini BPK;	WTP	WTP	100,00%
		Maturitas SPIP	3,2	3,634	113,56%
		Rasio PAD.	0,33	0,34	103,03%
<b>11</b>	<b>Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN</b>	Indeks Profesionalisme ASN	77,1	76,32	98,99%
<b>12</b>	<b>Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi</b>	Indeks Kematangan SPBE	4,54	2,6	57,27%

### 2.3.2 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3.5**

#### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan dengan Capaian Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi* (angka un audit)	Capaian (%)	
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,1	79,41	103,00%	231.260.235.515,00	224.837.372.621,06	97,22%	105,94%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,1	82,69	100,72%	325.008.626.462,00	297.107.169.185,27	91,42%	110,18%
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,1	86,16	101,25%	12.119.745.515,00	11.777.816.733,00	97,18%	104,18%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,3	10,01	158,89%	66.360.153.851,00	58.469.190.594,00	88,11%	180,33%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,35	4,36	100,23%	426.210.679.380,00	328.805.869.773,00	77,15%	129,92%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,6	56,31	83,30%	43.133.911.226,00	35.777.121.868,00	82,94%	100,43%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi* (angka un audit)	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,5	7,66	97,87%	33.510.420.252,00	24.508.993.764,00	73,14%	118,31%
	Persentase Penurunan PMKS	5	3,76	75,20%				
	Rata-rata Capaian			86,53%				
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,884	0,8483	95,96%	104.500.673.153,00	101.026.746.726,00	96,68%	100,36%
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,1	95,24	98,08%				
	Rata-rata Capaian			97,02%				
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	82	100	121,95%	13.226.434.895,00	9.800.864.733,00	74,10%	164,58%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai SAKIP	83,5	80,7	96,65%	1.266.511.111.240,00	1.074.419.160.097,00	84,83%	125,35%
	Opini BPK	WTP	WTP	100,00%				
	Maturitas SPIP	3,15	3,634	115,37%				
	Rasio PAD	0,3	0,34	113,33%				
Rata-rata Capaian			106%					
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	75,84	76,32	100,63%	7.287.582.561,00	5.482.323.264,00	75,23%	133,77%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,45	2,6	58,43%	16.555.649.967,00	16.306.116.512,00	98,49%	59,32%
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>101,52%</b>	<b>2.545.685.224.017,00</b>	<b>2.188.318.745.870,33</b>	<b>85,96%</b>	<b>118,10%</b>

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui *cost per outcome* atau anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja apakah kegiatan yang dilakukan dan menggunakan anggaran telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja *outcome* adalah sebesar **101,52%** dengan realisasi anggaran sebesar **85,96%**. Capaian kinerja tahun ini meningkat dibanding tahun lalu sebesar **94%**. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Malang sudah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai kinerja daerah.

### **2.3.3 Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.**

Pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang masuk dalam kategori **Berhasil** dan **Sangat Berhasil** adalah pencapaian pada sasaran:

1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter, dengan indikator Indeks Pendidikan, di mana tercapai sebesar 79,41 dari target tahun 2022 yaitu 77,1 atau sebesar 103%. Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu program pengelolaan pendidikan dengan melalui peningkatan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan Angka Partisipasi Murni SD/MI. Variabel pembentuk indeks pendidikan yaitu angka Harapan Lama Sekolah 15,76 dan Rata-rata Lama Sekolah 10,69 juga mengalami kenaikan sehingga indeks pendidikan juga meningkat dan mencapai target;
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan, dengan indikator Indeks Kesehatan, di mana tercapai sebesar 82,69 dari target tahun 2022 yaitu 82,1 atau sebesar 100,72%. Program-program yang mendukung capaian ini adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terutama dukungan kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota dan kegiatan penyediaan layanan kesehatan

untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota yang merupakan upaya pemuhan SPM urusan Kesehatan serta peningkatan cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan (UHC). Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian bayi mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target. Sedangkan NDR (*Net Death Rate*) juga menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mendukung peningkatan kinerja daerah. Selain itu berkat kolaborasi dan komitmen Kota Malang untuk bersama-sama menangani *stunting*, capaian kinerja *stunting* dapat melebihi target. Meskipun demikian *stunting* masih menjadi prioritas karena masih di angka 9,3%. Angka harapan hidup juga meningkat sebesar 73,75 sehingga indeks kesehatan meningkat. Akan tetapi dengan meningkatnya harapan hidup maka perlu diperhatikan penanganan lanjut usia dan rasio ketergantungan lansia;

3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan, dengan indikator Indeks Daya Beli/*Purchasing Power Parity*, di mana tercapai sebesar 86,16 dari target tahun 2022 sebesar 85,1, atau sebesar 101,25%. Hal ini karena dukungan beberapa program di antaranya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, dengan indikator Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif, di mana tercapai sebesar 10,01% dari target tahun 2022 sebesar 6,30%, atau sebesar 158,89%. Pertumbuhan ekonomi kreatif di tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yaitu 4,96%. Upaya fasilitasi ekosistem ekonomi kreatif dan para pelaku kreatif baik dalam bentuk bangunan **Malang Creative Center (MCC)** sebagai wadah

tempat beraktivitas dan melakukan promosi serta perdagangan dan dukung lainnya dalam bentuk peningkatan expo/pameran produk local kota Malang, pembuatan aplikasi Malpro sebagai wadah para UMKM lokal untuk berjualan dan kewajiban para pegawai menggunakan produk lokal dan berbelanja produk lokal. Aktiviasi kawasan baru yaitu **Kayutangan Heritage** yang menambah nilai ekonomi kawasan tersebut dan peningkatan UMKM ekonomi kreatif maupun investor baru, cukup menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Meskipun demikian masih diperlukan upaya-upaya perbaikan menuju kemandirian sosial dan fiskal;

5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), di mana tercapai sebesar 4,36 dari target tahun 2022 sebesar 4,35 atau sebesar 100,230%. Hal ini disebabkan dukungan beberapa program di antaranya Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Permukiman, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Hampir semua indikator dapat tercapai dengan baik, namun perlu upaya perbaikan sendiri untuk mencapai target program yang belum mencapai target terutama pada rumah tidak layak huni. Pencapaian target kepuasan infrastruktur karena Kota Malang tahun 2022 fokus penganggaran adalah pada penanganan perbaikan/pemeliharaan jalan-jalan yang berlubang yang menjadi ketidaknyamanan pengguna jalan;
6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan dengan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Untuk indikator Indeks Pembangunan Masyarakat telah tercapai sebesar 0,8483 dari target tahun 2022 sebesar 0,884, atau sebesar 95,96%.

Sedangkan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah tercapai sebesar 95,24 dari target tahun 2022 sebesar 97,10 atau sebesar 98,08%. Rata-rata capaian kedua indikator tersebut adalah 97,02%. Hal ini disebabkan dukungan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (di 57 Kelurahan). Faktor pembentuk yang mempengaruhi IPMas adalah Indeks Gotong Royong; Indeks Toleransi; dan Indeks Rasa Aman dimana saat ini komponen terbesar hasil survei terhadap masyarakat adalah Indeks Toleransi sebesar 0,90 yang menggambarkan stabilitas kehidupan masyarakat di lingkungannya saling menghormati, toleransi. Selain itu masyarakat juga aktif berpartisipasi dalam melakukan kegiatan bersama dan peduli terhadap lingkungan ditunjukkan dengan indeks gotong royong dengan nilai sebesar 0,83;

7. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum dengan indikator Persentase perda yang ditegakkan, di mana tercapai sebesar 100% dari target tahun 2022 sebesar 82% atau sebesar 121,95%. Hal ini tercapai dengan dukungan program Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Target capaian program semua tercapai 100% dengan dukungan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Fasilitasi Bantuan Hukum;
8. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif dengan indikator Nilai SAKIP, Opini BPK, Maturitas SPIP dan Rasio PAD. Target rata-rata tercapai 106% melalui dukungan beberapa program diantaranya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh semua Perangkat Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan kecamatan, Program

Penyelenggaraan Pengawasan serta pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan inspektorat, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dengan seluruh *stakeholder Hexahelix* yang dilakukan Bappeda dalam rangka kolaborasi/*cross cutting* menyelesaikan isu strategis daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka menjaga keselarasan dan konsistensi perencanaan dengan penganggaran. Selain itu rasio PAD meningkat di tahun 2022 yaitu sebesar 0,34 dari tahun 2021 sebesar 0,28. Hal ini adalah upaya Kota Malang menuju kemandirian fiskal yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) melalui optimalisasi retribusi parkir menggunakan *e-parking*, peningkatan kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD dengan mengubah pengelolaan aset dari sistem izin pemakaian (IP) menjadi sewa dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

9. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN, di mana tercapai sebesar 76,32 dari target tahun 2022 sebesar 75,84 atau sebesar 100,63%. Target dapat tercapai melalui dukungan Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (terkait standar kompetensi yang ditetapkan).

Sedangkan pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang belum berhasil mencapai target adalah pada sasaran:

1. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, di mana tercapai sebesar 56,31 dari target tahun 2022 sebesar 67,60 atau sebesar 83,3% menurun dari tahun sebelumnya. Ketidakberhasilan mencapai target di tahun ini disebabkan rendahnya indeks kualitas air yang hanya sebesar 29,26. Hal ini

disebabkan Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kondisi hulu sungai yang dengan kondisi terjadi hujan lebat dimana membawa banyak material pencemar yg terlarut di dalam arus sungai sehingga menyebabkan kualitas air sungai yg masuk ke wilayah Kota Malang menjadi keruh dan tercemar. Selain itu masih tingginya pencemaran sungai dari limbah pertanian dan peternakan yang belum memenuhi standar baku mutu;

2. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial, dengan indikator persentase penurunan PMKS dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Untuk indikator Persentase Penurunan PMKS telah tercapai sebesar 3,76% dari target tahun 2022 sebesar 5,00% atau sebesar 75,20%. Meskipun belum tercapai optimal akan tetapi meningkat dibanding tahun sebelumnya pada angka -0,42%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan upaya menangani PMKS. Sedangkan untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka telah tercapai sebesar 7,66 dari target tahun 2022 sebesar 7,50 atau sebesar 97,87% dan mengalami penurunan signifikan dari tahun 2021 yang sebesar 9,65%. Rata-rata capaian kedua indikator tersebut adalah 86,53%. Meskipun penurunan PMKS mengalami progres akan tetapi belum dapat menurunkan jumlah PMKS secara signifikan. Pemberian Bantuan Langsung Tunai untuk fakir miskin yang terdata di DTKS dan belum menerima bantuan apa pun dan keberlanjutan bantuan non tunai melalui e-warung menjadi upaya peningkatan kinerja;
3. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi, dengan target indikator Indeks Kematangan SPBE di mana tercapai sebesar 2,6 dari target tahun 2022 sebesar 4,45 atau sebesar 58,43% dan menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu dengan nilai 2.73. Hal ini disebabkan belum optimalnya penguatan peraturan perundang-undangan daerah terkait perencanaan SPBE dan penataan arsitektur SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Domain tata kelola dan manajemen SPBE pada Indeks Kematangan SPBE masih dibawah angka 2 (dua), padahal domain layanan SPBE sudah di angka 3,57. Ini menunjukkan

sebenarnya untuk e-government sudah cukup bagus akan tetapi perlu penguatan pada domain tata kelola yang nilainya hanya 1,09 dan domain manajemen dengan nilai 1,90. Sedangkan domain kebijakan masih bisa dioptimalkan karena nilai masih 2,50. Manajemen pengetahuan SPBE, kegiatan manajemen perubahan SPBE, manajemen layanan SPBE dianggap diterapkan tanpa perencanaan. Selain itu hasil evaluasi indikator SPBE menunjukkan bahwa Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum tersedia, Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi, Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum diterapkan atau diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana, Pengendalian Keamanan Informasi belum atau telah tersedia dalam tahap pembangunan, Kegiatan Manajemen Data diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana. Telaah evaluasi Indeks SPBE menjadi prioritas untuk diselesaikan karena pemerintahan berbasis elektronik harus diterapkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

Adapun **upaya perbaikan** dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah:

1. Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian dan pengelolaan air limbah domestik, industri, rumah sakit, hotel dan perdagangan jasa sehingga kualitas air sungai menjadi lebih baik. Selain itu kondisi pemantauan kualitas air sungai seharusnya dapat menjadi dasar untuk ditingkatkan pengelolaan sungainya agar memenuhi standar baku mutu sehingga perlu dilakukan pemantauan rutin kualitas Air Sungai dan Udara Ambien secara berkala minimal 3 bulan sekali pada tiap tahunnya. Perlu menjadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai prioritas agar Indeks Kualitas Lahan mengalami peningkatan. Melakukan upaya pencegahan pembuangan sampah ke sungai dengan melibatkan peran serta masyarakat seperti pelaksanaan Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS) secara rutin dan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang tinggal di emukiman



- yang ada di bantaran sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai;
2. Upaya mengurangi PMKS melalui optimalisasi peran serta puskesmas dan memaksimalkan *update* data kesejahteraan sosial *by name, by address* dan *by needs* sehingga penanganan PMKS dapat optimal sesuai kebutuhan dan dapat mengentaskan PMKS mandiri. Selain itu sebagai bentuk kolaborasi antar Perangkat Daerah agar terjadi kesinambungan program dan kegiatan pemerintah dengan pengentasan kemiskinan, maka *update* data kesejahteraan sosial yang akan dijadikan DTKS menjadi data/objek/kelompok sasaran setiap kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Isu strategis kemiskinan dijadikan prioritas untuk diselesaikan secara bersama *cross cutting* pada perencanaan berikutnya. Setiap Perangkat Daerah mengetahui peran dan irisan/kolaborasi yang dilakukan untuk turut menangani kemiskinan. Sehingga diharapkan penanganan kemiskinan menjadi terpadu efektif dan efisien;
  3. Upaya meningkatkan kematangan SPBE melalui penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE yang sesuai dengan Arsitektur SPBE Nasional dan selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional, selain itu memastikan penerapan SPBE dilakukan berdasarkan perencanaan SPBE yang telah disusun. Manajemen Risiko SPBE perlu disusun dan diterapkan agar program kegiatan yang terarah dan terencana.
  4. Dalam rangka perbaikan kinerja, maka diperlukan perencanaan yang efektif menyelesaikan *gap* kinerja dan permasalahan aktual. Oleh karena itu pada penyusunan perencanaan tahun 2024 diupayakan perbaikan dengan melaksanakan forum lintas Perangkat Daerah bersama *stakeholder hexahelix* dengan *cross cutting* pada isu strategis yang terdapat di Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan **tematik cross cutting** arah kebijakan tahun pertama dan permasalahan aktual yaitu: Stunting, Kemiskinan, Birokrasi yang responsive dan adaptif, Daya Saing SDM, Perlindungan sosial dan daya beli, Tata Kota dan Branding.

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah pada tahun yang berkenaan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan masyarakat setempat. Namun demikian dengan mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pemerintah Kota Malang tidak dapat melaporkan kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hal itu dilakukan mengingat selama tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota Malang tidak termasuk daerah yang mendapat penugasan, Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, bahwa tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND). Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh Perangkat Daerah secara konsisten dan efektif.

#### **4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN**

##### **4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan.

Sedangkan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa;
2. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;  
dan
3. Tata cara pemenuhan standar.

##### **4.1.2 Target Pelayanan Dasar Oleh Daerah**

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan urusan pendidikan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

**Tabel 4.1.2**  
**Target Pencapaian SPM**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN DASAR</b>	<b>INDIKATOR SPM</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>BATAS WAKTU CAPAIAN</b>
<b>1</b>	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun
<b>2</b>	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	100%	Setiap tahun
<b>3</b>	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun

#### **4.1.3 Alokasi Anggaran**

Selama tahun 2022 sampai dengan semester 2 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan

fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja dan SPM yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dianggarkan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp573.229.416.580,00 yang bersumber dari APBD Kota Malang, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN (Dana Alokasi Khusus/DAK). Untuk rincian anggaran dan realisasi per program kerja dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

**Tabel 4.1.3**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022**

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Program Pengelolaan Pendidikan	224.401.310.601	218.948.513.034	<b>100,00%</b>
Program Pengembangan Kurikulum	32.480.000	32.480.000	<b>79,30%</b>
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	371.200.000	294.372.500	<b>96,43%</b>
Program Pengembangan Kebudayaan	1.298.440.000	1.252.122.000	<b>99,96%</b>
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	138.500.000	138.440.000	<b>99,61%</b>
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	281.120.000	280.012.750	<b>98,27%</b>
Program Pengelolaan Permuseuman	1.598.899.150	1.571.270.350	<b>92,50%</b>

Program Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	345.107.466.829	319.229.811.735	<b>96,43%</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>573.229.416.580</b>	<b>541.747.022.369</b>	

#### 4.1.4 Realisasi

Hasil capaian atau realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Realisasi dapat dilihat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau tiap semester, atau pada akhir tahun berjalan. Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Pendidikan. Adapun hasil capaian SPM Bidang Pendidikan Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1.4**  
**Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET	REALISASI
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100% (26.493 anak)	74.05% (19.618 anak)
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	100% (125.620 anak)	91.85% (115.377 anak)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET	REALISASI
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100% (1.911 anak)	89% (1.719 anak)

Capaian SPM Bidang Pendidikan untuk pada Jenis Pelayanan PAUD sebesar 74.01%. Hal ini dikarenakan ada kurang lebih 14% atau sekitar 3.647 anak usia 5 s.d 6 tahun yang telah bersekolah di jenjang Sekolah Dasar (SD). Selain itu masih terdapat Lembaga PAUD yang enggan mengurus NPSN sehingga terdapat data anak usia 5 s.d 6 tahun belum masuk DAPODIK.

- 1) Capaian SPM Bidang Pendidikan untuk pada Jenis Pelayanan Pendidikan Dasar sudah mencapai 91.85% namun belum 100%. Serupa dengan permasalahan capaian SPM PAUD, bahwa terdapat kurang lebih sebanyak 17% atau sekitar 7.084 penduduk usia 14 s.d 15 tahun telah menempuh Pendidikan SMA sederajat.

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dalam menunjang pemenuhan SPM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 53 ASN dan 85 Tenaga Penunjang Operasional Kegiatan (TPOK) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 4.1.5**  
**Jumlah Personil/Pegawai yang terlibat dalam pencapaian SPM**

1. Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
<b>Pegawai PNS</b>				
1.	S-2	7	4	11
2.	S-1	26	13	39
3.	D-3	-	-	-
4.	D-2	-	-	-
5.	D-1	-	-	-
6.	SMA/SMK	3	-	3
7.	< SMP	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>36</b>	<b>17</b>	<b>53</b>
<b>Pegawai Non PNS</b>				
1.	S-2	-	-	-
2.	S-1	39	18	78
3.	D-3	-	-	-
4.	D-2	-	-	-
5.	D-1	-	-	-
6.	SMA/SMK	19	2	-
7.	< SMP	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	<b>58</b>	<b>78</b>

2. Data Pegawai berdasarkan Golongan

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH		TOTAL
			LAKI-	PEREMP	



			<b>LAKI</b>	<b>UAN</b>	
<b>1.</b>	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
<b>2.</b>	Pembina Tk. I	IV/b	-	2	2
<b>3.</b>	Pembina	IV/a	6	3	9
<b>4.</b>	Penata Tk.I	III/d	3	6	9
<b>5.</b>	Penata	III/c	2	3	5
<b>6.</b>	Penata Muda Tk. I	III/b	4	1	5
<b>7.</b>	Penata Muda	III/a	9	-	9
<b>8.</b>	Pengatur Tk. I	II/d	6	2	8
<b>9.</b>	Pengatur	II/c	2	1	3
<b>10.</b>	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1	-	1
<b>11.</b>	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
<b>12.</b>	Juru Tk. I	I/d	1	-	1
<b>13.</b>	Juru	I/c	-	-	-
<b>14.</b>	Juru Muda Tk.I	I/b	-	-	-
<b>15.</b>	Juru Muda	I/a	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			<b>36</b>	<b>17</b>	<b>53</b>

### 3. Data Pegawai berdasarkan Jabatan

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>		<b>TOTAL</b>
		<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	2	3	5
3.	Eselon IV	3	5	8
4.	Pejabat Fungsional yang disetarakan	2	1	3
5.	Fungsional Umum/Pelaksana	28	8	36
<b>JUMLAH</b>		<b>36</b>	<b>17</b>	<b>53</b>

#### 4.1.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun berbagai permasalahan yang

dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kota Malang Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
  - a) Masih belum ada data penduduk yang tidak bersekolah
  - b) terdapat lembaga PAUD yang belum memiliki NPSN dan data siswa PAUD nya belum terdata di DAPODIK sehingga data jumlah kepesertaan PAUD masih rendah.
2. Perhitungan Kebutuhan
  - a) Dikarenakan keterbatasan anggaran maka perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar masih belum mencakup semua sasaran yang diharapkan.
3. Perencanaan dan Penganggaran
  - a) Perencanaan Penganggaran masih terpusat pada penyediaan biaya personil pada SD dan SMP, kemampuan anggaran masih belum mampu mengakomodir biaya personel PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.
4. Pelaksanaan
  - a) Partisipasi Pendidikan PAUD masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan lebih dari 10% penduduk usia 5 s.d 6 tahun telah bersekolah di SD sedangkan kebijakan terkait usia masuk sekolah masih ada toleransi peserta didik usia 6 tahun boleh bersekolah di SD.

## **4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN**

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan.

### **4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Pelayanan Kesehatan di kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( HIV)

Sedangkan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis SPM Bidang Kesehatan meliputi :

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
2. Standar jumlah dan kualitas personel/ sumber daya manusia kesehatan
3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

#### **4.2.2 Target Pelayanan Dasar**

Indikator SPM Bidang Kesehatan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan dasar bidang kesehatan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang telah ditetapkan.

**Tabel 4.2.2**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan**  
**Kota Malang Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN DASAR</b>	<b>INDIKATOR PELAYANAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>BATAS WAKTU CAPAIAN</b>
<b>1</b>	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100 %	<b>Setiap Tahun</b>
<b>2</b>	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	<b>Setiap Tahun</b>
<b>3</b>	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100 %	<b>Setiap Tahun</b>
<b>4</b>	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	<b>Setiap Tahun</b>

<b>5</b>	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	<b>Setiap Tahun</b>
<b>6</b>	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	<b>Setiap Tahun</b>
<b>7</b>	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100 %	<b>Setiap Tahun</b>
<b>8</b>	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	<b>Setiap Tahun</b>
<b>9</b>	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penderita diabetes mellitus usia $\geq 15$ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	100 %	<b>Setiap Tahun</b>

		standar		
<b>10</b>	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	<b>Setiap Tahun</b>
<b>11</b>	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	<b>Setiap Tahun</b>
<b>12</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)</b>	<b>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</b>	<b>100 %</b>	<b>Setiap Tahun</b>

#### 4.2.3 Realisasi

Hasil capaian atau realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Realisasi dapat dilihat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan atau tiap tribulan, atau pada akhir tahun berjalan dengan menggunakan bantuan aplikasi Kementerian Kesehatan yang dapat diakses melalui <https://spm.kemkes.go.id>. Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Kesehatan. Adapun hasil capaian SPM Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2.3**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Malang**  
**Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	12.946	11.019	<b>85,12</b>
<b>2</b>	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	11.928	10.484	<b>87,89</b>
<b>3</b>	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	11.360	10.421	<b>91,73</b>
<b>4</b>	Pelayanan Kesehatan Balita			
	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	46.247	39.553	<b>85,53</b>

<b>5</b>	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98.532	81.448	<b>82,66</b>
<b>6</b>	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			
	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	606.244	447.831	<b>73,87</b>
<b>7</b>	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			
	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	110.746	58.564	<b>52,88</b>
<b>8</b>	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq$ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	228.720	128.525	<b>56,19</b>
<b>9</b>	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)			
	Jumlah penderita diabetes mellitus usia $\geq$ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22.227	24.291	<b>109,29</b>
<b>10</b>	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			



	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.415	1.297	<b>91,66</b>
<b>11</b>	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	17.014	19.299	<b>113,43</b>
<b>12</b>	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)			
	<b>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</b>	<b>21.974</b>	<b>15.531</b>	<b>70,68</b>

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja dan target SPM bidang kesehatan maka didukung dengan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp401.911.395.111,00 yang bersumber dari APBD Kota Malang dan APBN (Dana Alokasi Khusus/DAK).

**Tabel 4.2.4**  
**Alokasi dan Realisasi Dinas Kesehatan Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	200.190.606.614,00	185.220.261.630,00	<b>92,52</b>

<b>2</b>	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.984.285.472,00	1.814.844.220,00	<b>91,46</b>
<b>3</b>	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	445.028.000,00	318.268.156,00	<b>71,52</b>
<b>4</b>	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	8.685.821.800,00	8.540.536.300,00	<b>98,33</b>
<b>5</b>	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	190.605.653.225,00	163.819.941.696,27	<b>85,95</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>401.911.395.111,00</b>	<b>359.713.852.002,27</b>	<b>89,5%</b>

Pada dasarnya, semua anggaran pada Dinas Kesehatan secara langsung dan tidak langsung akan mendukung pencapaian standar pelayanan minimal, meskipun secara nomenklatur sub kegiatan tidak menyebutkan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksudkan.

#### **4.2.5 Dukungan Personil**

Untuk menunjang pencapaian target SPM, dapat dirinci berdasarkan jenis pelayanan pada bidang kesehatan. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan antara satu jenis pelayanan kesehatan dengan jenis pelayanan kesehatan yang lain. Adapun untuk dukungan personil tiap pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.5****Dukungan Personil / Pegawai yang terlibat dalam pencapaian SPM**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JENIS TENAGA</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter	<b>16 orang</b>
		Bidan	<b>204 orang</b>
		Perawat	<b>16 orang</b>
<b>2</b>	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter	<b>16 orang</b>
		Bidan	<b>204 orang</b>
		Perawat	<b>16 orang</b>
<b>3</b>	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter	<b>16 orang</b>
		Bidan	<b>204 orang</b>
		Perawat	<b>16 orang</b>
<b>4</b>	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter	<b>16 orang</b>
		Bidan	<b>204 orang</b>
		Perawat	<b>16 orang</b>
		Ahli Gizi	<b>16 orang</b>
<b>5</b>	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter	<b>16 orang</b>
		Bidan	<b>16 orang</b>
		Perawat	<b>16 orang</b>
		Ahli Gizi	<b>16 orang</b>
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	<b>16 orang</b>
<b>6</b>	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Dokter	<b>16 orang</b>
		Bidan	<b>16 orang</b>
		Perawat	<b>16 orang</b>
		Ahli Gizi	<b>16 orang</b>
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	<b>16 orang</b>
<b>7</b>	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dokter	<b>16 orang</b>
		Bidan	<b>16 orang</b>
		Perawat	<b>16 orang</b>

		Ahli Gizi	<b>16 orang</b>
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	<b>16 orang</b>
<b>8</b>	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter	<b>16 orang</b>
		Bidan	<b>16 orang</b>
		Perawat	<b>16 orang</b>
		Ahli Gizi	<b>16 orang</b>
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	<b>16 orang</b>
<b>9</b>	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Dokter	<b>16 orang</b>
		Bidan	<b>16 orang</b>
		Perawat	<b>16 orang</b>
		Ahli Gizi	<b>16 orang</b>
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	<b>16 orang</b>
<b>10</b>	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	<b>43 orang</b>
<b>11</b>	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dokter	<b>43 orang</b>
		Perawat	<b>41 orang</b>
		Analisis Teknik Laboratorium Medik	<b>25 orang</b>
		Penata Rontgen	<b>16 orang</b>
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	<b>36 orang</b>
<b>12</b>	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko	Dokter	<b>31 orang</b>
		Bidan	<b>31 orang</b>

Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan tubuh Manusia (Humas Immunodeficiency Virus)	Perawat	<b>16 orang</b>
	Ahli Gizi	<b>16 orang</b>
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	<b>16 orang</b>

Pada tabel diatas data dukungan personil masih terbatas pada UPT di Dinas Kesehatan (Puskesmas) saja. Khusus pada SPM pelayanan tuberkulosis dan SPM pelayanan kesehatan HIV sudah mengakomodir data tenaga kesehatan selain dari puskesmas, yaitu bersumber dari beberapa rumah sakit dan klinik.

#### **4.2.6 Permasalahan Dan Solusi**

Upaya dan kendala menggambarkan situasi atau kondisi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik dari eksternal maupun internal. Adapun berbagai upaya dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Malang Tahun 2022 sesuai dengan jenis pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upaya :
  - a) Pelayanan ANC Terpadu di Fasilitas Kesehatan
  - b) Pemberian akses antrian khusus untuk ibu hamil di Puskesmas
  - c) Mobile ANC plus (melakukan pelayanan ANC mobile untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari Puskesmas
  - d) Pendampingan Ibu hamil resiko tinggi oleh kader untuk peningkatan deteksi resiko ibu hamil oleh masyarakat
  - e) Pelaksanaan sosialisasi E-Kohort sebagai platform pencatatan hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak secara riil time
  - f) Pelaporan Pelayanan KIA secara manual melalui email sehingga memudahkan Puskesmas untuk memilah ibu hamil di wilayah masing-masing
  - g) Pendataan ibu hamil oleh kader di wilayah masing-masing Puskesmas

- h) Pelatihan USG bagi dokter umum di 4 Puskesmas oleh Kemenkes.

Kendala:

- a) Ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak yang ada di sasaran (sasaran terlalu tinggi)
- b) Ibu hamil melakukan ANC di berbagai tempat sehingga akumulasi kunjungan terputus. Jika E-Kohort telah berjalan maksimal kendala dapat teratasi
- c) Kurang tertibnya Rumah Sakit dalam pelaporan KIA baik manual maupun melalui aplikasi

## 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upaya:

- a) Pendampingan Ibu hamil resiko tinggi oleh kader sampai dengan bayi baru lahir
- b) Pelaksanaan sosialisasi E-Kohort sebagai platform pencatatan hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak secara riil time
- c) Pelaporan Pelayanan KIA secara manual melalui email sehingga memudahkan Puskesmas untuk mitati ibu hamil di wilayah masing-masing

Kendala:

- a) Ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak yang ada di sasaran (sasaran terlalu tinggi) sehingga ibu yang melahirkan juga tidak mencapai sasaran
- b) Ibu bersalin di luar Kota Malang sehingga sulit untuk mendapatkan akses data pelayanan kesehatan yang telah didapat.
- c) Kurang tertibnya Rumah Sakit dalam pelaporan KIA baik manual maupun melalui aplikasi

## 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upaya :

- a) Pendataan bayi baru lahir oleh kader
- b) Pelaporan pelayanan bayi oleh Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, PMB
- c) Pelaksanaan Program Skrining Hipotiroid Kongenital. Data bayi wajib masuk ke E-Kohort

- d) Pelaksanaan sosialisasi E-Kohort sebagai platform pencatatan hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak secara riil time

Kendala:

- a) Sasaran bayi baru lahir terlalu tinggi
- b) Bayi pindah luar kota sebelum mendapatkan pelayanan KN3
- c) Capaian imunisasi BCG belum 100

4. Pelayanan Kesehatan Balita Upaya :

- a) Pendataan balita di Posyandu
- b) Pelaksanaan sosialisasi E-Kohort sebagai platform pencatatan hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak secara riil time
- c) Kendala:
- d) Balita yang ditemukan tidak sebesar sasaran (sasaran terlalu tinggi)
- e) Tidak semua balita datang ke Posyandu
- f) Imunisasi IDL dan booster belum 100%

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Upaya :

- a) Terus mengadvokasi puskesmas dalam memfollow up pengisian form (dalam bentuk manual maupun google form) oleh peserta didik melalui guru masing2 sekolah, dengan harapan ada peningkatan capaian

Kendala:

- a) Beberapa peserta didik dan keluarganya kesulitan dalam mengakses internet
- b) Ketika sudah bisa mengakses, kesulitan dan kurang paham saat mengisi (puskesmas dan guru tidak bisa membantu karena proses pengisian dilakukan saat di rumah)
- c) Dalam melakukan pengisian tidak dijawab secara lengkap sehingga petugas puskesmas kesulitan dalam merekap data

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Upaya :

- a) Memberikan edukasi kepada kader dan masyarakat untuk tetap melaksanakan posbindu dengan menerapkan prokes ketat

- b) Meningkatkan volume promkes kepada masyarakat di berbagai media tentang pentingnya deteksi dini PTM (penyakit tidak menular)
- c) Kegiatan posbindu diperluas ke beberapa tempat/fasilitas umum lainnya
- d) Kerjasama dg faskes swasta untuk melakukan deteksi dini pada masyarakat terutama pada peserta JKN di faskes dan melakukan jemput bola pelayanan skrining kesehatan PTM di berbagai tempat

Kendala:

- a) Situasi pandemi covid 19, menyebabkan posbindu tutup dan aktifitas masyarakat terbatas
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting deteksi dini kesehatan penyakit tidak menular
- c) Kurang masifnya edukasi dan promosi kesehatan dr petugas kepada masyarakat
- d) Kurang aktif petugas dalam menjaring masyarakat dalam kegiatan skrining kesehatan penyakit tidak menular

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Upaya :

- a) Pendataan dan pencatatan skrining lansia dilakukan secara online dengan partisipasi kader lansia dan karang werdha kelurahan
- b) Pengadaan strip gula darah dan kolesterol sebagai sarana dan prasarana skrining kesehatan lansia sesuai standar
- c) Sosialisasi tentang perawatan jangka panjang lansia untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat kemandirian lansia
- d) Bekerjasama dengan lintas program dan lintas sector terkait pelayanan kesehatan lansia

Kendala:

- a) Jumlah lansia riil yang ditemukan tidak sesuai dengan sasaran proyeksi, target sasaran jauh lebih tinggi
- b) Tidak semua lansia bisa datang ke posyandu untuk di data dan di skrining



- c) Masih kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana (strip gula darah dan kolesterol) sejumlah lansia

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upaya :

- a) Meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat di berbagai media tentang pentingnya penanganan hipertensi agar terkontrol dan tidak menyebabkan meningkat faktor risiko penyakit yang lain
- b) Meningkatkan kinerja petugas dalam mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan penyakit hipertensi
- c) Meningkatkan kerjasama dengan jejaring faskes terutama dalam pelayanan dan pelaporan

Kendala:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting deteksi dini kesehatan penyakit tidak menular dan tindak lanjut pengobatan hipertensi agar tetap terkontrol
- b) Kurang masifnya edukasi dan promosi kesehatan dari petugas
- c) Kurang aktifnya petugas dalam pembinaan dan menjangkau capaian layanan di faskes selain puskesmas terutama laporan dari jejaring faskes

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upaya :

- a) Meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat di berbagai media tentang pentingnya penanganan diabetes melitus agar terkontrol dan tidak menyebabkan meningkat faktor risiko penyakit yang lain
- b) Melakukan kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta terkait tertibnya pelaporan

Kendala:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting deteksi dini kesehatan penyakit tidak menular dan tindak lanjut pengobatan hipertensi agar tetap terkontrol
- b) Kurang masifnya edukasi dan promosi kesehatan dari petugas

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Upaya :
- a) Melakukan prosedur dengan koordinasi pihak puskesmas dan RT RW juga Kantor kelurahan setempat.
  - b) Dalam hal proses melakukan rujukan, diambil alih oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas supaya lebih terkoordinasi dan teradministrasi dengan baik.
  - c) Melakukan sosialisasi dengan warga agar warga mau menerima kembali orang dengan gangguan jiwa yang telah selesai melakukan proses pengobatan dengan baik.
- Kendala:
- a) Kendala yang sangat sering dialami selama ini dalam rujukan atau mencari Surat rujukan dari Puskesmas ke Rumah sakit tipe C atau D. Dalam hal ini dinas kesehatan masih belum ada MOU khusus untuk bisa nya mendapatkan proses surat rujukan mengingat tidak bisa menghadirkan ODGJ tersebut. Karena jika tidak ada Surat rujukan pihak keluarga Akan dikenakan biaya tambahan di awal masuk.
  - b) Apabila rujukan pada diluar jam Dinas, puskesmas tidak bisa melayani secara maksimal. Sehingga saat ini bantuan atau solusi yang ditempuh dengan pihak satpol PP yang membantu dalam hal evakuasi ke rumah sakit.
  - c) Masih adanya pihak pihak yang tidak respek dengan keberadaan orang dengan gangguan jiwa.
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upaya :
- a) Penemuan kasus secara aktif, di bulan juni puskesmas melaksanakan skrining aktif ke pondok pesantren, sekolah, panti/asrama sebagai salah satu tempat risiko tinggi TB
  - b) Pada bulan Maret dilaksanakan skrining TB menggunakan X ray di LAPAS Klas 1 Lowokwaru dengan sasaran 1300 terduga
  - c) Penambahan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan terduga TB ke SITB (sistem informasi tuberkulosis)

- d) Adanya standar prosedur operasional optimalisasi penemuan kasus dalam rangka hari TB nasional pada Maret 2022 yang menetapkan kriteria terduga TB adalah semua batuk tanpa melihat durasi

Kendala:

- a) Masih adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang belum melaporkan secara periodik
- b) Sulit melakukan program terapi pengobatan TB, sulit memberi pengarahan kepada keluarga pasien untuk menerapkan protocol kesehatan dengan alasan karena mereka merasa sehat-sehat saja disamping juga alasan bahwa enggan untuk berobat selama enam bulan

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Upaya:

- a) Membuka layanan baru
- b) Supervisi kegiatan program HIV di layanan untuk melihat pencatatan, pelaporan dan kualitas program
- c) Pemeriksaan ibu hamil, populasi kunci, pasien TB dan pasangan resiko tinggi, dihitung untuk melihat kesenjangan target
- d) Validasi data, mentoring, on the job training untuk layanan baru

Kendala:

- a) PPKM masih berlaku sehingga terdapat beberapa langkah yang belum bisa dilakukan seperti mobile klinik
- a) Petugas layanan yang lebih berkonsentrasi dalam proses tracing pasien covid-19
- b) Banyaknya terdapat mutasi petugas sehingga petugas yang baru masih awam dan masih perlu proses untuk memahami aplikasi SIHA (sistem informasi hiv aids)

### 4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kota.

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 jenis pelayanan dasar yang menjadi tuisi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPK) Kota Malang yaitu SPM Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat meliputi :

1. SPM Bidang Pekerjaan Umum terdiri dari dua jenis pelayanan yaitu:
  - a) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
  - b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

**Tabel 4.3.1**  
**Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum**

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Warga negara terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Warga negara yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air

		Limbah Domestik dan dekat badan air
--	--	-------------------------------------

#### 4.3.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu.

**Tabel 4.3.2**

#### Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
		Indikator	Target	Indikator	Target
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100% Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang Memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari yang akan dipenuhi)
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pengolahan air limbah domestik	100% Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)

**Tabel 4.3.3**

#### Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari -	94,01%	Akses Layak 95,82% Akses Aman 84,59%

	hari		
<b>2</b>	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	85,32%	Akses aman 25,64%

#### 4.3.3 Realisasi

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah. Selama tahun 2022, dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum telah dialokasikan anggaran sebesar Rp13.684.325.582,00 sebagai berikut :

**Tabel 4.3.4**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022**

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.180.567.400	3.788.418.599	90,62%
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	4.180.567.400	3.788.418.599	90,62%
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	2.946.183.000,00	2.579.590.599	87,56%
Pengembangan SDM Dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	88.323.400,00	65.487.000	74,14%

Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Di Kawasan Perkotaan	1.146.061.000,00	1.143.341.000	99,76%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.503.758.182	8.143.460.114	85,69%
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.503.758.182	8.143.460.114	85,69%
Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	660.130.100	509.300.100	77,15%
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.563.270.800	2.376.502.800	92,71%
Sosialisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	119.180.000	98.620.000	82,75%
Pengembangan SDM Dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	83.606.000	83.540.000	99,92%
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	4.679.131.400	3.862.936.100	82,56%
Pembangunan/Penyediaan Sarana Dan Prasarana IPLT	191.990.000	95.430.000	49,71%

Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	377.425.155	327.783.529	86,85%
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	420.138.208	412.091.388	98,08%
Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	408.886.519	377.256.197	92,26%

#### 4.3.4 Dukungan Personil

Dalam menunjang pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum terdapat 16 ASN dan 4 Tenaga Penunjang Operasional Kegiatan (TPOK) yang berada di Bidang Cipta Karya Sub Substansi Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air (9 orang) serta UPT Pengolahan Air Limbah Daerah (11 orang) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 4.3.5**

#### Dukungan Personil / Pegawai yang terlibat dalam pencapaian SPM

1. Data pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
<b>PEGAWAI PNS</b>				
1	S-2	2	-	2
2	S-1	2	2	4
3	D-3	-	-	-
4	D-2	-	-	-
5	D-1	-	-	-
6	SMA/SMK	8	1	9
7	SMP	1	-	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>

#### Pegawai TPOK



<b>1</b>	S-2	-	-	-
<b>2</b>	S-1	1	1	2
<b>3</b>	D-3	-	-	-
<b>4</b>	D-2	-	-	-
<b>5</b>	D-1	-	-	-
<b>6</b>	SMA/SMK	1	1	2
<b>7</b>	SMP	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

2. Data pegawai berdasarkan golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH		TOTAL
			Laki-laki	Perempuan	
<b>1</b>	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	
<b>2</b>	Pembina Tk I	IV/b	-	-	
<b>3</b>	Pembina	IV/a	2	-	2
<b>4</b>	Penata Tk I	III/d	-	-	
<b>5</b>	Penata	III/c	-	-	
<b>6</b>	Penata Muda Tk I	III/b	-	1	1
<b>7</b>	Penata Muda	III/a	2	1	3
<b>8</b>	Pengatur Tk I	II/d	3	-	3
<b>9</b>	Pengatur	II/c	4	-	4
<b>10</b>	Pengatur Muda Tk I	II/b	1	-	1
<b>11</b>	Pengatur Muda	II/a	1	-	1
<b>12</b>	Juru Tk I	I/d	1	-	1
<b>13</b>	Juru	I/c	-	-	
<b>14</b>	Juru Muda Tk I	I/b	-	-	
<b>15</b>	Juru Muda	I/a	-	-	
<b>JUMLAH</b>			<b>14</b>	<b>2</b>	<b>16</b>

3. Data pegawai berdasarkan jabatan

		<b>JUMLAH</b>	

NO	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Eselon II	-	-	-
2	Eselon III	1	-	1
3	Eselon IV	1	-	1
4	Pejabat Fungsional	1	-	1
5	Pelaksana	10	3	13
JUMLAH		<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>

#### 4.3.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan di bidang urusan pekerjaan umum antara lain:

1. Pengumpulan Data
  - a) Ketersediaan informasi data pendukung yang dibutuhkan dalam penghitungan SPM yang belum terintegrasi secara maksimal
  - b) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia
  - c) Kesulitan menentukan acuan database rumah tinggal sebagai salah satu indikator penghitungan angka SPM
  - d) Kesulitan melakukan update data indikator perhitungan SPM yang tidak secara langsung berada di bawah tuisi DPUPRPKP
  - e) Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap upaya perbaikan kualitas lingkungan
2. Perhitungan Kebutuhan
  - a) Adanya kesulitan dalam penerbitan SK Penetapan Bencana oleh kepala daerah yang merupakan dasar dalam pelaksanaan SPM karena merupakan kewenangan dari instansi lain.

- b) Perhitungan kebutuhan belum mencakup semua sasaran yang dibutuhkan karena kegiatan terkait SPM yang dilakukan masih dalam tahap pengumpulan data.
3. Perencanaan dan Penganggaran
- a) Perencanaan dan penganggaran masih terpusat pada proses pengumpulan data dan sosialisasi
4. Pelaksanaan
- a) Kurangnya pemahaman terkait metode pelaksanaan menyebabkan pelaksanaan kegiatan SPM kurang maksimal
  - b) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur penanganan terhadap rumah korban bencana

#### **4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kota.

##### **4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis Pelayanan dasara SPM Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari dua jenis pelayanan yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

**Tabel 4.4.1**  
**Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat**

NO	JENIS LAYANAN	MUTU PELAYANAN
----	---------------	----------------

1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar Standar rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</li> <li>- Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar</li> </ul>
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.</li> <li>- Sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar</li> </ul>

#### 4.4.2 Target Pencapaian Spm Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu.

**Tabel 4.4.2**  
**Target dan Indikaor Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
		INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET

<b>1</b>	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100% Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa	100% Setiap tahun (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)
<b>2</b>	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			100% Setiap tahun sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan

					rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)
--	--	--	--	--	---

#### 4.4.3 Realisasi

Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp584.414.000 yang bersumber dari APBD Kota Malang dan DAK. Pada tahun 2022, Kota Malang memperoleh anggaran DAK Air Minum sebesar Rp1.500.000.000,00 dan DAK Sanitasi Air Limbah Domestik sebesar Rp4.220.082.000,00. Untuk rincian anggaran dan realisasi nya dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.4.3**  
**Realisasi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat**

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	2 Unit	1 Unit
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	-

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp584.414.000 yang bersumber dari APBD Kota Malang dan DAK. Pada tahun 2022, Kota Malang memperoleh anggaran DAK Air Minum sebesar Rp1.500.000.000,00 dan DAK Sanitasi Air Limbah Domestik sebesar Rp4.220.082.000,00. Untuk rincian anggaran dan realisasi nya dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.4.4**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat**  
**Tahun 2022**

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Program Pengembangan Perumahan	584.414.400	583.914.400	99,91%
Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	284.160.000	284.160.000	100,00%
Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	284.160.000	284.160.000	100,00%
Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	300.254.400	299.754.400	99,83%
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	300.254.400	299.754.400	99,83%

#### **4.4.5 Dukungan Personil**

Dalam menunjang pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat terdapat 3 ASN yang berada di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 4.4.5****Jumlah Personil/pegawai yang terlibat dalam pencapaian SPM**

1. Data pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
<b>Pegawai PNS</b>				
1	S-2	-	-	-
2	S-1	1	1	2
3	D-3	-	-	-
4	D-2	-	-	-
5	D-1	-	-	-
6	SMA/SMK	1	-	1
7	SMP	-	-	-
JUMLAH		2	1	3
<b>Pegawai TPOK</b>				
1	S-2	-	-	-
2	S-1	-	-	-
3	D-3	-	-	-
4	D-2	-	-	-
5	D-1	-	-	-
6	SMA/SMK	-	-	-
7	SMP	-	-	-
JUMLAH		-	-	-

2. Data pegawai berdasarkan golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH		TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
2	Pembina Tk I	IV/b	-	-	-
3	Pembina	IV/a	-	-	-
4	Penata Tk I	III/d	-	-	-
5	Penata	III/c	1	-	1



<b>6</b>	Penata Muda Tk I	III/b	-	-	-
<b>7</b>	Penata Muda	III/a	-	1	1
<b>8</b>	Pengatur Tk I	II/d	1	-	1
<b>9</b>	Pengatur	II/c	-	-	-
<b>10</b>	Pengatur Muda Tk	II/b	-	-	-
<b>11</b>	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
<b>12</b>	Juru Tk I	I/d	-	-	-
<b>13</b>	Juru	I/c	-	-	-
<b>14</b>	Juru Muda Tk I	I/b	-	-	-
<b>15</b>	Juru Muda	I/a	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

#### **4.4.6 Permasalahan Dan Solusi**

##### 1. Pengumpulan Data

- a) Belum selesainya pendataan bangunan (data by name by address) sebagai dasar memetakan akses layanan dasar
- b) Ketersediaan informasi data pendukung yang dibutuhkan dalam penghitungan SPM yang belum terintegrasi secara maksimal
- c) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia
- d) Kesulitan menentukan acuan database rumah tinggal sebagai salah satu indikator penghitungan angka SPM
- e) Kesulitan melakukan update data indikator perhitungan SPM yang tidak secara langsung berada di bawah tuisi DPUPRPKP
- f) Tidak terdeteksinya kemungkinan rumah tinggal dengan akses layanan ganda sehingga terhitung ulang untuk satu rumah tinggal
- g) Belum terdapat penetapan lokasi bencana sebagai dasar perbaikan rumah korban bencana
- h) Belum terdapat penetapan relokasi warga di area rawan bencana
- i) Kesulitan menentukan titik lokasi rawan bencana yang akan dikaji karena Keterbatasan data pendukung dan jenis

bencana serta frekuensi keterjadian bencana yang relatif rendah

- j) Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap upaya perbaikan kualitas lingkungan

2. Perhitungan Kebutuhan

- a) Adanya kesulitan dalam penerbitan SK Penetapan Bencana oleh kepala daerah yang merupakan dasar dalam pelaksanaan SPM karena merupakan kewenangan dari instansi lain.
- b) Perhitungan kebutuhan belum mencakup semua sasaran yang dibutuhkan karena kegiatan terkait SPM yang dilakukan masih dalam tahap pengumpulan data.

3. Perencanaan dan Penganggaran

- a) Perencanaan dan penganggaran masih terpusat pada proses pengumpulan data dan sosialisasi

4. Pelaksanaan

- a) Kurangnya pemahaman terkait metode pelaksanaan menyebabkan pelaksanaan kegiatan SPM kurang maksimal
- b) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur penanganan terhadap rumah korban bencana

#### **4.5 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah /Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah/Kota.

##### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis layanan dasar urusan trantibum linmas yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

#### 4.5.2 Target Pencapaian Spm Oleh Daerah

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Sub-Urusan Bencana Daerah secara bertahap sesuai dengan indicator dan nilai yang ditetapkan.

#### 4.5.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkan dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

**Tabel 4.5.3**  
**Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022**

NO.	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	REALISA	STANDAR NASIONAL	
			SI	TARGET	REALISASI
			KINERJA	2022	2022
1	2	3	4	5	6

<b>1</b>	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%
<b>2.</b>	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang disediakan dalam rangka pemenuhan layer dasar urusan trantibum linmas Tahun 2022 bersumber dari APBD dan DBHCHT. Berikut adalah alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dimaksud:

**Tabel 4.5.4**  
**Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM dan Realisasi**

NO.	URAIAN	JUMLAH (RP)		%
		ANGGARAN	REALISASI	
<b>A</b>	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.815.634.219	3.652.257.693	75,84%

	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.596.775.748	3.385.322.412	94,12%
<b>1</b>	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	3.596.775.748	3.385.322.412	94,12%
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.218.858.471	266.935.281	21,90%
<b>2</b>	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.218.858.471	266.935.281	21,90%
<b>B</b>	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.133.314.636	2.038.654.277	95,56%
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota	2.033.314.636	1.961.366.737	94,46%
<b>1.</b>	Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	350.000.000	326.825.000	93,38%

<b>2.</b>	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.683.314.636	1.634.541.737	97,10%
<b>C.</b>	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100.000.000	77.287.490	77,29%
<b>1.</b>	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100.000.000	77.287.490	77,29%
<b>JUMLAH</b>		<b>6.948.948.855</b>	<b>5.690.911.970</b>	<b>81,89%</b>

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

**Tabel 4.5.5**  
**Jumlah personil/pegawai yang terlibat dalam pencapaian SPM**

No	BIDANG	JUMLAH	JENIS KELAMIN		PANGKAT				PENDIDIKAN					
			L	P	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Sekretariat	8	4	4	-	2	4	3	-	-	3	-	1	4
2	KKU	46	43	3	-	34	11	1	-	-	28	7	10	1
3	PPUD	13	8	5	1	1	9	2	-	-	4	-	7	2
4	LINMAS	7	7	-	-	2	4	1	-	-	2	-	5	-
5	DAMKAR	39	35	4	2	31	6	-	1	2	13	20	3	-

<b>JUMLAH</b>	113	97	16	3	70	34	7	1	2	50	27	26	7
---------------	-----	----	----	---	----	----	---	---	---	----	----	----	---

#### **4.5.6 Permasalahan Dan Solusi**

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

1. Perencanaan :  
Peningkatan kualitas SDM Satpol melalui mengikutsertakan pelatihan atau bimtek masih sangat terbatas.
2. Koordinasi :  
Kurang maksimalnya respon dari OPD terkait dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah / Perkada.
3. Pendanaan :  
Keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia.

Adapun yang solusi yang diupayakan guna meningkatkan penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

1. Perencanaan :  
Memaksimal SDM yang ada.
2. Koordinasi :  
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penanganan pelanggaran Perda / Perkada
3. Pendataan :  
Memaksimalkan Anggaran dan SDM yang ada.

Adapun Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan :

1. Perencanaan :  
Menganggarkan di tahun berikutnya.
2. Koordinasi :  
Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui

sosialiasi Perda / Perkada.

3. Pendataan :

Menganggarkan di tahun berikutnya.

## **4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL**

### **4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub- Urusan Sosial Daerah Kaputan/Kota, Jenis pelayanan dasar Sub - Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana kabupaten/Kota

Sedangkan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Sub- Urusan Sosial mencakup:

1. Pemberian Bantuan Permakanan
2. Pemberian Alat Bantu
3. Pemberian Bantuan Sandang
4. Pelayanan Reunifikasi Keluarga
5. Pelayanan Bimbingan Fisik Mental dan Spiritual

### **4.6.2 Target Pelayanan Dasar**

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Sub-Urusan Sosial secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.



**Tabel. 4.6.2**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Malang**  
**Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN DASAR</b>	<b>INDIKATOR PELAYANAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>BATAS WAKTU CAPAIAN</b>
<b>1</b>	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Luar Panti	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	80%	Setiap tahun
		Persentase pencapaian mutu Minimal Pelayanan Dasar	20%	Setiap tahun
<b>2</b>	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	80%	Setiap tahun
		Persentase pencapaian mutu Minimal Pelayanan Dasar	20%	Setiap tahun
<b>3</b>	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	80%	Setiap tahun
		Persentase pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	20%	Setiap tahun
<b>4</b>	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	80%	Setiap tahun
		Persentase pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	20%	Setiap tahun
<b>5</b>	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	80%	Setiap tahun

dan Pasca bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian mutu Minimal Pelayanan Dasar	20%	Setiap tahun
---	--	-----	--------------

#### 4.6.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkan dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

**Tabel 4.6.3**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Malang**  
**Tahun 2022**

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	14.180.627.100	13.477.725.950	95,04
<b>Program Penanganan Bencana</b>	247.737.302	211.201.477	85,25

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Selama Tahun 2022 sampai dengan semester 2 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja dan SPM yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dianggarkan dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 14.428.364.402 yang bersumber dari APBD Kota Malang.

Untuk rincian anggaran dan realisasi per Program kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.6.4**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022**

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	14.180.627.100	13.477.725.950	95,04
<b>Program Penanganan Bencana</b>	247.737.302	211.201.477	85,25
Jumlah	<b>14.428.364.402</b>	<b>13.688.827.427</b>	<b>94.87</b>

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Dalam menunjang pemenuhan SPM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang memiliki 55 ASN dan 50 Tenaga Penunjang Operasional Kegiatan (TPOK) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.6.5**

**Jumlah personil/pegawai yang terlibat dalam pencapaian SPM**

1. Data Pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
<b>Pegawai ASN</b>				
1	S-3	1	1	2
2	S-2	2	8	10
3	S-1	1	25	26
4	D-3	0	2	2
5	D-2	0	0	0
6	D-1	0	0	0
7	SMA/SMK	10	3	13
8	SMP	2	0	2
Jumlah		<b>16</b>	<b>39</b>	<b>55</b>
<b>Pegawai Non ASN</b>				
1	S-2	1	0	1
2	S-1	12	6	18
3	D-3	2	2	4
4	D-2	0	1	1
5	D-1	0	0	0
6	SMA/SMK	18	6	24

<b>7</b>	SMP	2	0	2
Jumlah		<b>35</b>	<b>15</b>	<b>50</b>

## 2. Data Pegawai berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT	GOL	JUMLAH		TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
<b>1</b>	Pembina Utama Muda	IV/c	0	1	1
<b>2</b>	Pembina Tk.I	IV/b	0	0	0
<b>3</b>	Pembina	IV/a	3	10	13
<b>4</b>	Penata Tk.I	III/d	0	6	6
<b>5</b>	Penata	III/c	0	2	2
<b>6</b>	Penata Muda Tk.I	III/b	1	10	11
<b>7</b>	Penata Muda	III/a	1	8	9
<b>8</b>	Pengatur Tk.i	II/d	4	1	5
<b>9</b>	Pengatur	II/c	1	1	2
<b>10</b>	Pengatur Muda Tk.I	II/b	5	0	5
<b>11</b>	Pengatur Muda	II/a	1	0	1
<b>12</b>	Juru Tk.I	I/d	0	0	0
<b>13</b>	Juru	I/c	0	0	0
<b>14</b>	Juru Muda Tk.I	I/b	0	0	0
<b>15</b>	Juru Muda	I/a	0	0	0
Jumlah			<b>16</b>	<b>39</b>	<b>55</b>

## 3. Data Pegawai berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
<b>1</b>	Eselon II	0	1	1
<b>2</b>	Eselon III	1	5	6
<b>3</b>	Eselon IV	0	1	1
<b>4</b>	Pejabat Fungsional yang disetarakan	2	12	14

<b>5</b>	Fungsional	12	21	33
	Umum/Pelaksana			
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>40</b>	<b>55</b>

#### **4.6.6 Permasalahan Dan Solusi**

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial antara lain :

1. Perencanaan :

Dalam dokumen perencanaan belum fokus terhadap urusan dasar dan pemenuhan SPM

2. Koordinasi :

Kurang pedulinya masyarakat terhadap adanya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis

3. Pendanaan :

Anggaran dan Sumber Daya Manusia belum mampu menjangkau semua urusan dasar dan pemenuhan SPM

4. Lain – Lain :

Data serta pendayagunaan data yang belum optimal

Adapun untuk solusi yang di upayakan guna menangani permasalahan pada pelaksanaan SPM Bidang Sosial antara lain:

1. Perencanaan :

Dokumen perencanaan kedepan akan disusun untuk lebih fokus terhadap pemenuhan SPM

2. Koordinasi :

Sosialisasi terkait kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat

3. Pendanaan :

Menyusun program yang lebih yang lebih tepat dalam pengusulan anggaran belanja dalam upaya peningkatan pagu anggaran

4. Lain -Lain :

Peningkatan mekanisme pendataan dan pendayagunaan data

## **4.7 BIDANG URUSAN BENCANA DAERAH**

### **4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/Kota meliputi:

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Sedangkan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Sub-Urusan Bencana mencakup:

1. Prosedur operasional penanggulangan bencana;
2. Sarana prasarana penanggulangan bencana;
3. Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
4. Pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

### **4.7.2 Target Pelayanan Dasar Oleh Daerah**

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Sub-Urusan Bencana secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

**Tabel 4.7.2**  
**Target Indikator Pelayanan**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN DASAR</b>	<b>INDIKATOR PELAYANAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>BATAS WAKTU CAPAIAN</b>
<b>1</b>	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
<b>2</b>	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
<b>3</b>	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun

#### **4.7.3 Realisasi**

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkan dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan :

**Tabel 4.7.3**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Bencana Kota Malang Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN DASAR</b>	<b>INDIKATOR PELAYANAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
-----------	------------------------------	----------------------------	---------------	------------------

<b>1</b>	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	11,94%
<b>2</b>	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	16,58%
<b>3</b>	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%

#### **4.7.4 Alokasi Anggaran**

Selama tahun 2022 sampai dengan semester 2 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja dan SPM yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dianggarkan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp8.460.043.644,00 yang bersumber dari APBD Kota Malang.

Untuk rincian anggaran dan realisasi per program kerja dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

**Tabel 4.7.4  
Alokasi dan Realisasi anggaran Tahun 2022**

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
----------------	-----------------	------------------	----------



<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	2.475.531.750	2.275.869.919	91,93%
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	5.984.511.894	5.246.618.690	87,67%
<b>JUMLAH</b>	<b>8.460.043.644</b>	<b>7.522.488.609</b>	<b>88,92%</b>

#### 4.7.5 Dukungan Personil

Dalam menunjang pemenuhan SPM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 20 ASN dan 38 Tenaga Penunjang Operasional Kegiatan (TPOK) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 4.7.5**  
**Jumlah Personil / Pegawai yang terlibat dalam pencapaian SPM**

1. Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
<b>Pegawai PNS</b>				
1.	S-2	3	3	6
2.	S-1	8	4	12
3.	D-3	1		1
4.	D-2			
5.	D-1			
6.	SMA/SMK	1		1
7.	< SMP			
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
<b>Pegawai Non PNS</b>				
1.	S-2	1		1
2.	S-1	13	4	17
3.	D-3	1		1
4.	D-2			
5.	D-1			
6.	SMA/SMK	14	1	15
7.	< SMP	4		4
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>5</b>	<b>38</b>

2. Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
<b>Pegawai PNS</b>				
1.	S-2	3	3	6
2.	S-1	8	4	12
3.	D-3	1		1
4.	D-2			
5.	D-1			
6.	SMA/SMK	1		1
7.	< SMP			
JUMLAH		<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
<b>Pegawai Non PNS</b>				
1.	S-2	1		1
2.	S-1	13	4	17
3.	D-3	1		1
4.	D-2			
5.	D-1			
6.	SMA/SMK	14	1	15
7.	< SMP	4		4
JUMLAH		<b>33</b>	<b>5</b>	<b>38</b>

3. Data Pegawai berdasarkan Golongan

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH		TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c			
2.	Pembina Tk. I	IV/b	1		1
3.	Pembina	IV/a	3	2	5
4.	Penata Tk.I	III/d	3	2	5
5.	Penata	III/c			
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	5	1	6
7.	Penata Muda	III/a	1	1	2
8.	Pengatur Tk. I	II/d			

9.	Pengatur	II/c		1	1
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b			
11.	Pengatur Muda	II/a			
12.	Juru Tk. I	I/d			
13.	Juru	I/c			
14.	Juru Muda Tk.I	I/b			
15.	Juru Muda	I/a			
<b>JUMLAH</b>				<b>13</b>	<b>7</b>
				<b>20</b>	

#### 4. Data Pegawai berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Eselon II	1		1
2.	Eselon III	1	3	4
3.	Eselon IV	1		1
4.	Pejabat Fungsional yang disetarakan	4	1	5
5.	Fungsional Umum/Pelaksana	6	3	9
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>

#### 4.7.6 Permasalahan dan Solusi

##### 1. Permasalahan :

1. Jumlah Masyarakat yang berada di Kawasan Rawan bencana cukup besar akan tetapi anggaran yang ada tidak memadai.
2. Keterlibatan Perangkat Daerah terkait pencapaian SPM Sub Urusan Bencana belum terakomodir, terintegrasi dan optimal

##### 2. Solusi :

1. Meningkatkan Pagu Indikatif di Renja BPBD Kota Malang
2. Perlu ada kewajiban bagi Perangkat Daerah Kewilayahan (Kelurahan dan Kecamatan) untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketangguhan

bencana bersama sama dengan BPBD untuk mencapai target SPM.

#### **4.8 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan daerah melaksanakan urusan konkuren.

Urusan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yakni urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pemerintah Kota Malang menyelenggarakan seluruh Urusan Wajib baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Sedangkan urusan pilihan Pemerintah Kota Malang tidak menyelenggarakan urusan pilihan bidang:

1. Kehutanan;
2. Energi dan sumber daya mineral;
3. Transmigrasi.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut di atas Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah, yang mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
2. Sekretariat DPRD, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan

- menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
3. Inspektorat, yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
  4. Dinas, dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  5. Badan, dibentuk untuk melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:
    - a) perencanaan;
    - b) keuangan;
    - c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
    - d) penelitian dan pengembangan; dan
    - e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  6. Kecamatan, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Adapun program kegiatan perbidang yang dilakukan antara lain: Program Kegiatan Program dan kegiatan yang mendukung pelayanan SPM bidang Pendidikan, terdiri dari 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN SPM BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2.	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3.	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

#### 4.8.1 SPM Bidang Pendidikan

Program dan kegiatan yang mendukung pelayanan SPM bidang Pendidikan, terdiri dari 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut.

**Tabel 4.8.1**  
**Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN SPM BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia
2.	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3.	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4.	Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga

		Kependidikan	Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
--	--	--------------	--

#### 4.8.2 Program Kegiatan SPM Bidang Kesehatan

Adapun semua program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Malang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya untuk pencapaian target standar pelayanan minimal. Secara langsung ada beberapa sub kegiatan dengan nomenklatur yang sama persis dengan nomenklatur standar pelayanan kesehatan. Secara tidak langsung terdapat banyak sub kegiatan dengan nomenklatur yang berbeda akan tetapi saling mendukung untuk tercapainya target SPM.

**Tabel 4.8.2**  
**Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minu	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Peningkatan Pelayanan BLUD

#### 4.8.3 Program Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang mendukung pelayanan SPM Bidang Pekerjaan Umum terdiri dari 2 program, 2 kegiatan, dan 12 sub kegiatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 4.8.3**  
**Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			<b>Sub Kegiatan :</b>
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam

	Pengembangan Sistem Air Limbah	Daerah Kabupaten/Kota
		<b>Sub Kegiatan :</b>
		Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

			Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sarana dan Prasarana IPLT
--	--	--	---

#### 4.8.4 Program Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang mendukung pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari 1 program, 2 kegiatan, dan 2 sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 4.8.4**  
**Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat**  
**Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	PROGRAM	KEGIATAN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota <b>Sub Kegiatan :</b> Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota <b>Sub Kegiatan :</b> Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

<b>2</b>	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	-	-
----------	---	---	---

Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 berfokus pada jenis pelayanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota sedangkan untuk pelayanan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota dimulai pada tahun 2023.

#### **4.8.5 Program Kegiatan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
  - b) Penyusunan laporan keuangan
  - c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
  - d) Penyusunan/reviu Renstra
  - e) Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA
  - f) Penyusunan Renja/RKT
  - g) Penyusunan profil perangkat daerah
  - h) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - i) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor
  - j) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- k) Penyediaan jasa surat menyurat
  - l) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - m) Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - n) Penyediaan alat tulis kantor
  - o) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - p) Penyediaan makanan dan minuman
  - q) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  - r) Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus
  - s) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - t) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - u) Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur
2. Program Penegakan Peraturan Perundang – Undang Daerah
- a) Operasi Penegakan Perda
  - b) Penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum
  - c) Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah
  - d) Peningkatan Koordinasi Pengawasan dengan PPNS
  - e) Perencanaan Infrastruktur Jembatan di Kota Malang
3. Program Perlindungan Masyarakat
- a) Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan Lingkungan
  - b) Pengerahan Dukungan Satuan Linmas
  - c) Sosialisasi peranan anggota Linmas
  - d) Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat
  - e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pencegahan Kebakaran
  - f) Peningkatan Pelayanan penanggulangan Bahaya kebakaran.

#### **4.8.6 Program Kegiatan SPM Bidang Sosial**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pelayanan SPM Sub- Urusan Sosial, terdiri dari 2 (dua) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 4.8.6**  
**Program dan Kegiatan Bidang Sosial Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN SPM</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB. KEGIATAN</b>
<b>1</b>	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Penyediaan Permakanan
<b>2</b>	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Penyediaan sandang
<b>3</b>	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
<b>4</b>	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
				Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
<b>5</b>	Perlindungan	Program	Perlindungan	Penyediaan Makanan

	dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap	Penanganan Bencana	Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Penyediaan Sandang
--	--------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------

#### 4.8.7 Program Kegiatan SPM Urusan Bencana

Program dan kegiatan yang mendukung pelayanan SPM Sub-Urusan Bencana, terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut.

**Tabel 4.8.7**  
**Program dan Kegiatan Bidang Bencana Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), yang penyusunannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan yang memuat pelaksanaan semua program dan kegiatan, keberhasilan, dan permasalahan yang dihadapi beserta solusinya, yang meliputi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

Laporan ini memuat informasi tentang kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta disepakati bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai pengemban amanah masyarakat Kota Malang selama kurun waktu tahun 2022. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang.

Dengan ungkapan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh masyarakat Kota Malang yang selama ini telah memberi banyak masukan bagi perbaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Malang.



Masukan dan saran evaluasi tetap kami harapkan agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Dan kebersamaan eksekutif dan legislatif yang terjalin selama ini semakin erat lagi untuk mewujudkan **“KOTA MALANG BERMARTABAT”**.